

Muhammad Fauzan Noor, SE.Par., M.Par., MMHTRL.
Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si.



INDIKATOR Pengembangan Desa Wisata

Jilid I

“INDIKATOR PENGEMBANGAN DESA WISATA” JILID I

Penulis : Muhammad Fauzan Noor, SE.Par., ME.,Par, MMHTRL
Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si

ISBN : ...

Copyright © Oktober 2021

Ukuran: 14.8 cm x 21 cm; Hal: vi + 56

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : An Nuha Zarkasyi

Penata isi : Hasan Almuntaza

Cetakan I, Oktober 2021

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku Referensi ini dengan baik. Buku ini merupakan penjabaran dari indikator pengembangan Desa Wisata yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Buku ini merupakan buku serial atau Jilid pertama yang kami susun, dan InshaAllah akan kami lanjutkan lagi nantinya dengan jilid atau serial II.

Secara umum Buku ini membahas tentang Pemetaan Potensi Desa yang didalamnya berisi Kajian Penelitian dan Identifikasi, Kepemilikan dan Kepengurusan oleh Masyarakat, dan lain-lain.

Buku Referensi ini tidak akan selesai tanpa peran serta berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap buku ini. Kendatipun tidak bisa disebutkan satu persatu, rasa terimakasih kami ucapkan kepada Politeknik Negeri Samarinda khususnya Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) POLNES, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk membuat sebuah buku referensi

Buku ini senantiasa memerlukan kearifan berupa saran, teguran, dan kritik yang membangun agar dapat lebih optimal. Pada akhirnya, sekecil apapun sumbangan yang dapat diberikan dari buku ini semoga bermanfaat bagi pengembangan Desa Wisata yang ada baik di Kalimantan Timur maupun di Indonesia.

Samarinda, November 2021

Tim Penyusun

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL

PRAKATA

DAFTAR ISI

BAB I: PEMETAAN POTENSI DESA

A. Kajian Penelitian.....	1
B. Identifikasi.....	2
C. Analisis.....	5

BAB II: KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

A. Kepemilikan dan Kepengurusan oleh Masyarakat	9
B. Terdapat Pengelolaan Desa Wisata yang Efektif dan Transparan	13
C. Pengelolaan Desa Wisata.....	13
D. Kelembagaan Desa Wisata	18
E. Kemitraan Desa Wisata	19
F. Sadar Wisata dan Sapta Pesona	21

BAB III: LEGALITAS LEMBAGA KELOMPOK DESA

A. Penyiapan dan pengurusan legalitas desa wisata	31
B. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	31

BAB IV: MEMILIKI KEMITRAAN DESA WISATA

A. Mekanisme dalam Kemitraan	37
B. Bumdes, Koperasi dan Lembaga Desa	39
C. Permasalahan yang dihadapi BUMDes	46

DAFTAR PUSTAKA

PROFIL PENULIS	49
----------------------	----

BAB I

Pemetaan Potensi Desa

A. Kajian Penelitian

Daya tarik dari suatu desa wisata merupakan kombinasi dari kegiatan sosial dan budaya masyarakatnya, dimana hal semacam ini tergambar dalam sistem adat istiadat, pola kebudayaan, kearifan lokal, kehidupan masyarakat pedesaan. Tujuan dari adanya pengembangan desa wisata sendiri adalah untuk melestarikan suatu kondisi lingkungan dan memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal di suatu daerah sehingga melalui konsep desa wisata ini dapat menjadi salah satu bentuk pariwisata yang ramah lingkungan di masa depan (Juwita dalam Warpani, 2010).

Di dalam konsep desa wisata terkandung adanya keunikan yang bisa dioptimalkan oleh masyarakat setempat dan keunikan ini bisa berupa tangible (berwujud fisik) dan intangible (tidak kasat mata). Beberapa keunikan yang bersifat tangible misalnya bentuk arsitektur bangunan dan lansekap desa wisata, pola aktivitas masyarakat, serta paket-paket wisata yang ditawarkan didalamnya, sedangkan untuk yang bersifat intangible contohnya adalah kebiasaan dan norma yang berlaku di daerah tersebut, bentuk-bentuk kerja sama antar masyarakat, rasa saling kepercayaan yang diperlihatkan oleh masyarakat setempat, dsb. Kedua hal inilah yang dapat menambah daya pikat dari suatu desa wisata dan secara tidak langsung juga menggambarkan bagaimana bentuk pengelolaan dari desa wisata ini sendiri.

Pengembangan desa wisata yang optimal tidak dapat dilepaskan dari masalah ketersediaan PSD (Prasarana-sarana dasar) wisata. Adanya akses yang mudah menuju lokasi desa wisata tersebut tentu akan meningkatkan nilai tambah tersendiri selain beberapa kemudahan atau keunggulan potensi alam yang sudah dimiliki oleh desa wisata tersebut. Keberhasilan dalam proses pengembangan suatu desa wisata tidak dapat dilepaskan dari adanya campur tangan sebuah lembaga atau institusi lokal yang mengelola desa wisata tersebut. Institusi lokal ini yang menjadi perpanjangan tangan dari berbagai *stakeholder* yang terhubung langsung dan tak

langsung dengan semua aktivitas pariwisata di Desa Wisata sehingga hakikat dari keberadaan institusi lokal ini perlu dipahami dengan tepat dan komprehensif.

Desa sebagai potensi pariwisata pedesaan banyak dilirik menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan mancanegara dan domestik. Tidak sedikit wisatawan yang mencari suasana pedesaan untuk menghilangkan kepenatan mereka dari aktifitas rutin sehari-hari. Suasana desa yang masih asri dan kehidupan sosial budaya masyarakatnya umumnya menjadi alasan mengapa wisatawan memilih berkunjung ke desa atau pedesaan.

Wisata pedesaan (*rural tourism*) dapat diartikan sebagai bentuk atau jenis pariwisata yang menjadikan desa sebagai aktifitas utama wisatawan. Kehidupan masyarakat sebagai petani misalnya, tidak hanya menjadi aktifitas sehari-hari masyarakatnya, tetapi dapat menjadi produk wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan melalui paket *tour* wisata pedesaan. Para petani yang tinggal di desa-desa yang menjadi destinasi wisata dapat menyediakan pelayanan untuk wisatawan.

Idealnya, terdapat anggota masyarakat yang aktif dan mendorong masyarakat lainnya mengelola desa mereka. Namun, hal ini belum memunculkan anggota masyarakat yang memiliki semangat dan peluang untuk menjadi pionir pengelolaan potensi pariwisata bagaimana mengelola daya tarik wisata dan destinasi wisata melalui peran organisasi tata kelola pariwisata di tingkat pedesaan.

Untuk memahami tata kelola destinasi, Longjit dan Pearce (2013) membagi tata kelola destinasi ke dalam tiga bagian yakni tujuan, aktifitas atau kegiatan dan struktur organisasi tata kelola. Tujuan diartikan sebagai sasaran atau target yang akan dicapai suatu organisasi dalam menjalankan suatu kelompok organisasi tata kelola. Sasaran ini dituangkan dalam bentuk tujuan (*goals*) yang hendak dicapai pada periode tertentu. Aktifitas dapat dimaknai sebagai segala usaha, program atau kegiatan yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan organisasi tata kelola destinasi. Umumnya, organisasi tata kelola bidang pariwisata senantiasa menitikberatkan pada pentingnya mendorong masyarakat mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata serta pelestarian sumber-sumber pariwisata yang dijadikan sebagai daya tarik wisata.

B. Identifikasi

Desa sebagai unit terkecil struktur pemerintahan memegang peranan penting dalam pembangunan negara. Desa menjadi lini pertama identifikasi dan perencanaan pemecahan permasalahan di masyarakat.

Desa mandiri harus mampu mengatur, merencanakan, dan mengelola sumber kekuatan desa sendiri dengan melibatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan kebutuhan dari setiap warga desanya.

Selain itu, desa harus mampu mengelolah potensi desa secara optimal, akuntabel dan transparan, sehingga dapat dikelola dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Potensi desa ini dapat berupa semografi, geografis, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia (Bambang, 2017).

Pemetaan potensi desa merupakan salah satu model identifikasi segala sumber daya dan permasalahan yang ada di desa termasuk profil desa. Tujuan pemetaan potensi desa ini untuk mengidentifikasi sumberdaya alam, profil pemberdayaan masyarakat, dan permasalahan yang tersebar di wilayah desa. Pemetaan ini diharapkan sebagai dasar penyusunan rencana kerja, pendekatan pelaksanaan program kerja, dan acuan dasar proses perubahan sikap dan perilaku masyarakat.

Peta potensi desa yang mengikuti kerangka Kretzmann & McKnight (1993). Peta potensi desa dibagi kedalam tiga kategori, yaitu potensi individu, organisasi kelompok masyarakat, dan institusi lokal desa.

Peta potensi desa menjadi instrumen yang sangat penting sebagai petunjuk untuk BUMDes membuat program kerja atau kegiatan. Dengan adanya peta potensi desa, Desa dapat membuat strategi prioritas pembangunan desa melalui pendayagunaan BUMDes (Abidin, 2017). Dalam melakukan pemetaan potensi desa sangat penting untuk juga melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Aspirasi dan masukan dari berbagai elemen masyarakat dapat menjadi sumber gagasan atas berbagai proyek yang dapat dikerjakan oleh BUMDes. Oleh karenanya diharapkan dengan pemetaan potensi desa ini, dapat menjadi langkah dalam perumusan strategi jenis usaha apa yang bisa dikembangkan.

Kualitas sumber daya manusia, perlu diperhatikan karena sumber daya manusia merupakan obyek dan subyek dalam pengelola potensi desa. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas.

Keterlibatan dari berbagai komponen masyarakat ini penting dilakukan dari awal, yaitu sejak tahap perencanaan. Sosialisasi dan diskusi yang dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok terarah dapat menjadi metode yang efektif untuk menampung aspirasi, gagasan dan masukan dari masyarakat.

Observasi dan identifikasi potensi dan permasalahan yang ada di Desa Wisata sangat perlu dilakukan melalui pemetaan potensi sumber kekuatan Desa tersebut. Harapannya dengan pemetaan ini masyarakat dan pemerintah baik daerah maupun pusat bisa menggali dan memanfaatkan sumber daya desa sebagai modal untuk menjadi desa sehat dan mandiri.

Dalam tahapan ini masyarakat mengidentifikasi apa saja pekerjaan yang bisa dikerjakan secara kelompok. Masyarakat desa terkenal dengan nilai gotong-royong yang masih kental. Nilai sosial ini dapat digunakan juga sebagai modal sosial untuk menggerakkan masyarakat. Informasi ini diharapkan dapat dibagikan

kepada masyarakat secara luas supaya ketika ada masyarakat yang tertarik untuk bergabung mereka akan memilih sesuai dengan kelompok yang diminatinya.

Setiap anggota masyarakat diakui keunikannya dan setiap keunikan tersebut dianggap sebagai aset yang dapat membantu pengembangan komunitas yang berkelanjutan.

Penguatan BUMDes diharapkan dapat menjadi salah satu fasilitas untuk menggerakkan ekonomi desa dan membantu memecahkan masalah sosial dan lingkungan yang ada di desa. Penguatan BUMDes dapat difokuskan pada tiga hal utama. Yang pertama adalah pemetaan aset desa, kedua adalah peningkatan kapasitas pengelolaan dan manajemen dan ketiga adalah penguatan jaringan antar BUMDes.

Pertama yaitu pemetaan aset desa menjadi salah satu hal substantif yang dilakukan sebagai upaya penguatan BUMDes. Dalam pemetaan aset desa dapat diketahui apa saja produk atau jasa yang menjadi unggulan desa, selain itu keahlian dan kapasitas apa saja yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan serta nilai-nilai sosial masyarakat yang bisa digerakan untuk mendorong terjadinya perubahan sosial. Dari hasil pemetaan aset desa tersebut, dibuat desain pemberdayaan inventaris yang bertujuan untuk penguatan BUMDes.

Fokus penguatan yang kedua adalah peningkatan kapasitas pengelolaan dan manajemen BUMDes. Hasil dari pemetaan aset desa, saran peningkatan kapasitas pengelolaan dan manajemen BUMDes bisa dimulai berkolaborasi dengan para pemuda desa yang bergabung dalam kelompok karang taruna. Kolaborasi bisa dilakukan misalnya terkait pelatihan pemasaran yang efektif. Melatih pemuda relatif lebih mudah dibandingkan dengan melatih pengurus formal BUMDes dengan usia yang tidak muda lagi. Para pemuda ini terbiasa menggunakan gawai dan lebih aktif di dunia maya melalui sosial media dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Para pemuda ini juga memiliki energi yang lebih banyak dan juga ide yang lebih kreatif yang bisa diberdayakan untuk memasarkan produk-produk unggulan desa kepada pihak luar desa. Pemanfaatan metode berdagang melalui media elektronik (e-commerce) juga dapat digunakan sebagai langkah awal untuk memasarkan produk-produk unggulan desa.

Fokus penguatan yang ketiga adalah untuk menguatkan jejaring antar BUMDes. Jejaring ini diperlukan sebagai mitra BUMDes. Penguatan jejaring antar desa bisa dilakukan dengan asosiasi BUMDes. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara BUMDes termasuk juga untuk memperluas pemasaran produk unggulan desa dan menjadi wadah untuk komunikasi antar pengelola dan pengurus BUMDes.

Dalam pendekatan ini, semua anggota masyarakat dianggap memiliki aset untuk berkontribusi pada pembangunan desa. Metode kegiatan dilakukan dengan melakukan diskusi kelompok terarah yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari GAPOKTAN, kelompok petani ikan, karang taruna, pelaku UMKM dan para pengrajin yang ada serta kelompok Dasa Wisma. Kegiatan diskusi yang dilaksanakan mendapat antusiasme yang baik dari berbagai elemen masyarakat.

C. Analisis

Hasil menunjukkan bahwa bakat/potensi individu, organisasi warga dan lembaga lokal adalah faktor utama dalam penyusunan peta potensi desa. Lebih lanjut, hasilnya menunjukkan peningkatan kapasitas dan manajemen serta pengembangan jaringan desa sangat penting untuk penguatan Lembaga Pokdarwis maupun BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Mwiru (2015) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan rasa kepemilikan, memastikan alokasi dana tepat sasaran dan juga dapat mempercepat proyek pembangunan yang dilaksanakan.

Saat ini masih banyak desa yang belum mengetahui bagaimana melakukan pemetaan atas potensi desanya dan bagaimana menyusun prioritas atas potensi-potensi yang telah disusun. Kegagalan dalam menyusun perencanaan akan sangat fatal, mengingat pembangunan BUMDes bukanlah rencana jangka pendek namun juga rencana jangka panjang.

Untuk mendapatkan informasi mengenai potensi desa perlu menggali dengan cara partisipatif dari masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah dengan Asset Based Community-Driven Development (ABCD). Pendekatan ABCD dikembangkan oleh John L. McKnight dan John P. Kretzmann dari Northwestern University, Amerika Serikat. Metode ABCD adalah pendekatan yang menitikberatkan pada penyusunan strategi untuk pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat. Pendekatan ABCD ini tidak hanya terkait pada mobilisasi masyarakat dalam pembangunan di desa tetapi juga bagaimana mengidentifikasi dan membangun serta menciptakan aset lokal desa menjadi lebih berdayaguna.

Kelompok Terarah Kegiatan diskusi kelompok terarah dilakukan sebagai metode untuk melakukan pemberdayaan inventaris dengan tujuan untuk mengakses informasi yang masyarakat ketahui baik secara sadar maupun tidak sadar mengenai potensi desanya. Harapannya dasar dari informasi yang didapatkan dari pemberdayaan inventaris ini membuat masyarakat yakin bahwa setiap anggota masyarakat adalah aset yang berharga bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Metode diskusi kelompok terarah merupakan metode yang paling efektif dan efisien untuk menggali informasi terkait potensi masyarakat

dibandingkan dengan metode wawancara maupun survei dengan kuesioner (Freitas, Oliveira, Jenkins, & Popjoy, 1998). Hal ini karena dengan metode diskusi kelompok terarah diharapkan masing-masing anggota kelompok dapat melakukan diskusi dan menggali apa yang menjadi potensi masing-masing dan antar anggota kelompok juga sekaligus dapat melakukan konfirmasi terhadap pernyataan anggota yang lain dalam kelompok. Sedangkan dalam metode survey atau kuesioner akan sulit untuk memverifikasi jawaban dari peserta. Diskusi dilakukan sesuai dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda.

Penguatan BUMDes yang berkelanjutan juga tidak melupakan aspek pentingnya perubahan sosial yang mendukung, misalnya partisipasi dari masyarakat pada setiap pengambilan keputusan keputusan penting yang mempengaruhi masa depan desa. Selain itu penting pula penguatan modal sosial berupa nilai-nilai sosial sebagai katalisator inisiasi pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat yang inklusif juga menjadi komponen penting yang harus diperhatikan.

Perubahan sosial juga harus diarahkan untuk menciptakan efikasi kolektif yaitu menciptakan masyarakat yang memiliki keyakinan bersama terhadap kemampuan untuk mengatur dan melaksanakan program yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Pentingnya efikasi kolektif diperlihatkan pada beberapa penelitian misalnya oleh Goncalo, Polman & Maslach (2010) yang menyatakan bahwa kelompok yang memiliki efikasi kolektif yang tinggi akan lebih sukses dimasa yang akan datang dibandingkan dengan kelompok yang memiliki efikasi kolektif rendah.

Hal ini karena kelompok dengan efikasi kolektif yang tinggi lebih berani untuk menetapkan tujuan yang lebih besar dan menantang. Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Greenlees, Nunn, Graydon, & Maynard (1999) yang mengungkapkan bahwa kelompok dengan efikasi kolektif yang tinggi cenderung lebih banyak mengerahkan usaha dan bertahan lebih lama dalam menghadapi kesulitan dan tantangan yang dihadapi.

Peningkatan kapasitas pengelolaan dan manajemen BUMDes dapat dimulai dengan bekerjasama dan berkolaborasi dengan para pemuda dalam komunitas karang taruna. Hal ini merupakan langkah yang efisien untuk menjadikan BUMDes sebagai agen pemasaran produk-produk unggulan desa. BUMDes diharapkan dapat mengambil peran sebagai agen pemasaran atas produk-produk yang dihasilkan tersebut.

Fokus penguatan yang terakhir adalah peningkatan jejaring antar BUMDes yang diharapkan dapat menjadi jalan bagi terbukanya saluran baru untuk pemasaran produk serta sebagai wadah untuk saling belajar dan bertukar informasi.

Dalam pemetaan aset desa dapat diketahui apa saja produk atau jasa yang

menjadi unggulan desa, selain itu keahlian dan kapasitas apa saja yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan serta nilai-nilai sosial masyarakat yang bisa digerakan untuk mendorong terjadinya perubahan sosial. Dari hasil pemetaan aset desa tersebut, dibuat desain pemberdayaan inventaris yang bertujuan untuk penguatan BUMDes.

Partisipasi dari masyarakat pada setiap pengambilan keputusan keputusan penting yang mempengaruhi masa depan desa. Selain itu penting pula penguatan modal sosial berupa nilai-nilai sosial sebagai katalisator inisiasi pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat yang inklusif juga menjadi komponen penting yang harus diperhatikan. Perubahan sosial juga harus diarahkan untuk menciptakan efikasi kolektif yaitu menciptakan masyarakat yang memiliki keyakinan bersama terhadap kemampuan untuk mengatur dan melaksanakan program yang diperlukan untuk mencapai tujuan Bersama.

Dalam diskusi ini dihasilkan peta potensi desa yang mengikuti kerangka Kretzmann & McKnight (1993). Peta potensi desa dibagi kedalam tiga kategori, yaitu potensi individu, organisasi kelompok masyarakat, dan institusi lokal desa.

BAB II

Kepengurusan dan Pengelolaan

A. Kepemilikan dan Kepengurusan oleh Masyarakat

Kapasitas Pengelolaan SDM Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek paling penting dalam berjalannya suatu organisasi. Hal tersebut dikarenakan berjalannya organisasi digerakkan oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Horton (2003) mengungkapkan bahwa penting bagi organisasi untuk dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya. Di dalam bukunya Horton (2003) mengungkapkan bahwa sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan, dan teknologi.

Menurut Horton et al (2003), kapasitas kelembagaan pengelola yang dilihat dari aspek manajemennya akan dijelaskan dalam tiga kelompok yaitu (1) kepemimpinan strategis, (2) manajemen proses dan program, serta (3) jejaring dan hubungan.

1. Kepemimpinan Strategis
Sebagai seorang pemimpin, kapasitas yang harus dimiliki adalah:
 - a. Menilai dan menafsirkan kebutuhan dan peluang di luar organisasi
 - b. Menetapkan arah
 - c. Mempengaruhi dan menyelaraskan orang lain menuju tujuan bersama
 - d. Memotivasi dan mendorong untuk berkomitmen dan bertanggungjawab
2. Manajemen Proses dan Program dalam melihat kapasitas organisasi dari segi program dan proses ada 4 (empat) macam kapasitas yaitu:
 - a. Manajemen siklus proyek
 - b. Perencanaan dan perumusan program
 - c. Pemantauan dan evaluasi
 - d. Pelaporan
3. Jejaring dan Hubungan dengan Stakeholder menyatakan bahwa salah satu kapasitas operasional yang harus dimiliki terkait dengan relasi stakeholder adalah kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan mitra.

Grindle (1997) menyebutkan bahwa salah satu dimensi dalam pengembangan kapasitas adalah dimensi pengembangan sumber daya manusia. Fokus yang dibahas oleh Grindle pada dimensi pengembangan sumber daya manusia adalah adanya tenaga teknis yang profesional. Pasokan tenaga teknis profesional tersebut diperoleh dengan adanya pelatihan, sistem gaji, situasi kerja, dan perekrutan.

1. Pelatihan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kompetensi pengurus dalam menjalankan proses bisnisnya.
2. Sistem Gaji
3. Situasi Kerja Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pola kerja di kelompok pengelola ini bersifat kekeluargaan. Pengurus aktif sampai sekarang merupakan kesadaran sendiri dan tercipta suasana demokratis dalam setiap pengambilan keputusan. Pembahasan tentang konflik internal dapat diungkapkan di setiap rapat persiapan maupun rapat evaluasi.
4. Perekrutan Sistem
5. perekrutan pada kelompok pengelola desa wisata berdasarkan penunjukan dan kesepakatan dengan pihak individu. Tidak ada seleksi khusus karena organisasi ini adalah hasil swadaya masyarakat dan tidak berorientasi pada keuntungan. Perekrutan dilakukan sejak pengelola pertama kali dibentuk hingga saat ini belum pernah ada perekrutan kembali atau regenerasi. Tidak ada standar kompetensi khusus yang ditetapkan sebagai syarat bergabung menjadi pengurus dan tidak ada perjanjian dalam kinerjanya.

Aspek kapasitas mengelola sumber daya keuangan berdasarkan hasil penelitian pengelola masih melakukan pembukuan dengan pencatatan sederhana dalam sebuah buku besar. Pembukuan hendaknya menggunakan aplikasi sederhana yang bisa dicari di aplikasi playstore.

Menurut Suyatno dan Suparja (2003), partisipasi adalah mental dan emosional, yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam setiap kelompok, mencapai tujuan kelompok, dan berkontribusi melalui kemampuan untuk bertanggung jawab atas tujuan kelompok. Ini adalah salah satu bentuk partisipasi. Jika masyarakat desa terikat secara spiritual dan emosional, seolah-olah menjadi bagian dari kegiatan pariwisata yang berlangsung di desa mereka.

Struktur organisasi tata kelola destinasi merupakan inti dari eksistensi kelompok pengelolaan destinasi wisata. Pearce (2015) mengemukakan fungsi dan peran organisasi tata kelola destinasi sebagai berikut:

1. Organisasi tata kelola akan membantu dalam memasarkan, melakukan branding dan memosisikan (positioning) suatu destinasi.
2. Membantu mengembangkan dan atau mengelola produk yang dimiliki suatu destinasi.

3. Melakukan proses perencanaan, implementasi dan evaluasi program kerja yang berkaitan dengan pariwisata suatu destinasi.
4. Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata melalui peran fasilitator
5. Berperan dalam proses pemberian informasi kepada wisatawan serta membantu masyarakat dalam kegiatan sosialisasi urgensi dan manfaat pariwisata bagi masyarakat.

Faktor-Faktor Pendorong Kesuksesan Pengelolaan Desa Wisata, Secara internal, peran masyarakat adalah faktor utama keberhasilan Desa Wisata. Seluruh komponen masyarakat di desa perlu memberikan dukungan kepada para pengelola daya tarik wisata untuk memfasilitasi harapan dan keinginan masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai penduduk yang bermukim di Desa Wisata.

Bentuk kekompakan masyarakat bisa berbentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan layanan wisata kepada tamu-tamu wisata di desa. Rumah-rumah yang ada di desa bisa dimanfaatkan sebagai penginapan berupa homestay untuk pengunjung. Ketika pengunjung memasuki kawasan desa wisata, mereka dapat melihat rumah rumah masyarakat dengan identitas homestay. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pariwisata sebagai faktor penunjang kesuksesan desa wisata.

Keterlibatan masyarakat juga ditunjukkan dengan kesediaan mereka menerima pengunjung yang datang ke desa tersebut. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat tidak siap untuk menerima kunjungan wisatawan. Karena itu, desa-desa lain yang ada di Indonesia perlu memastikan bahwa masyarakat memberikan dukungan penuh kepada pengelola organisasi tata kelola untuk mengatur dan mengelola potensi pariwisata suatu destinasi.

Kesuksesan pengelolaan desa wisata tidak terlepas dari masyarakat yang mendiami desa tersebut. Masyarakat merupakan inti dari desa wisata maupun pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Desa yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata selayaknya dimulai dari masyarakatnya dan diperuntukkan untuk masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan Desa Wisata akan menjadikan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan pariwisata. Faktor utama kesuksesan tersebut adalah kemampuan generasi muda yang juga merupakan masyarakat asli yang mendiami desa tersebut untuk bekerja dan berinovasi membuat dan menciptakan paket wisata untuk wisatawan.

Kegiatan pariwisata dimulai dari kelompok pemuda yang sadar akan potensi daerahnya yang selanjutnya diperuntukkan untuk masyarakatnya. Faktor internal yang mencakup kesadaran bersama masyarakatnya, kemampuan generasi muda dalam mengelola potensi daerah melalui organisasi tata kelola

pariwisata (Pokdarwis) serta prinsip kebersamaan dan pemerataan dalam hal manfaat ekonomis untuk masyarakat adalah kunci sukses pengelolaan pariwisata pedesaan. Selain itu, dibutuhkan dukungan secara eksternal pemerintah setempat dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) luar yang menjadi pendorong suatu Desa Wisata.

Untuk mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat, pengelola Desa Wisata perlu melakukan berbagai upaya yang mencakup pemberian edukasi dan atau sosialisasi kepada masyarakat serta pemberian layanan ke wisatawan oleh masyarakat melalui koordinasi Organisasi Tata Kelola Pedesaan (Pokdarwis). Pariwisata berbasis masyarakat dapat terwujud karena kesadaran kolektif antara pengelola Pokdarwis dan masyarakat yang tinggal di desa tersebut sekaligus memberikan pelayanan ke wisatawan yang datang.

Pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism/CBT) merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya. Konsep pariwisata berbasis masyarakat berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) yang memerlukan partisipasi masyarakat.

Pengembangan desa wisata merupakan suatu proses atau aktifitas yang terjadi secara terus menerus, dengan meningkatkan, memajukan dan memelihara sumber daya yang terdapat di sebuah daerah tertentu yang bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata, baik Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Budaya (SDB). Pengembangan Desa Wisata dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan lembaga kepariwisataan yang tangguh. Oleh karena itu dibentuklah Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pariwisata yang memiliki tugas dan fungsi sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat Desa dalam mengelola, melestarikan serta memanfaatkan potensi alam yang menjadi daya tarik wisata.

Peraturan Pemerintah Nomer 72 tahun 2015 menjelaskan tentang definisi desa sebagai: sebuah kesatuan masyarakat secara hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan melaksanakan kepentingan masyarakat dengan cara mengurus dirinya sendiri, berangkat dari asal usul dan adat – istiadat tersebut Negara Indonesia harus menghormatinya (Ramadana.2005).

Pembangunan desa yang dilakukan secara terpadu, inovatif serta kreatif, merupakan pola dari program pembangunan yang berangkat dari proses pemetaan potensi sumberdaya alam dan masyarakat, yang akan membentuk dan mengarahkan pada keterlibatan semua unsur atau elemen, setelah di buat sebuah

perencanaan kemudian desa mencoba membuat perpaduan atau kolaborasi terhadap elemen–elemen pembuat kebijakan untuk menentukan titik temunya. Sehingga hal ini akan memperkuat kebijakan yang lahir dari kegiatan musyawarah, dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan yang telah disepakati (Sofianto, 2012).

Dwipayana dan Eko (2003) menjelaskan bahwa apabila konsep *good governance* diletakkan dalam lingkup desa maka ada dua isu strategis yang penting untuk diperhatikan. Pertama, isu pemerintahan demokratis (*democratic governance*), yaitu pemerintah desa yang berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi oleh masyarakat, dan kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk responsivitas masyarakat itu sendiri. Kedua, hubungan antar elemen *governance* di desa berdasarkan pada prinsip kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan dalam melakukan pembangunan desa secara kolektif untuk mencapai kebaikan bersama (*common good*) (Sidik, 2015)

B. Terdapat Pengelolaan Desa Wisata yang Efektif dan Transparan

1. Pengelolaan Desa Wisata

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelaskan bahwa, desa memiliki sumber dana yang kemudian disebut sebagai Dana Desa, dana tersebut bersumber dari APBN yang peruntukannya bisa dimanfaatkan oleh desa untuk menjalankan roda pemerintahan, dan pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dapat dikatakan, otonomi desa merupakan suatu gagasan besar dalam memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa desa harus mengambil peran yang besar secara makro ekonomi untuk memecahkan permasalahan di pedesaan yang memberikan implikasi secara mikro ekonomi (Samsir, 2016).

Kondisi tersebut membuat desa memiliki kekuatan dalam mengembangkan wilayah, dengan dukungan landasan yuridis, modal sosial, serta anggaran dana, yang bisa dikembangkan, salah satu modelnya adalah pengembangan kepariwisataan di desa Secara logika pemanfaat sumber-daya secara bijaksana, bisa dilakukan melalui model pembangunan perekonomian secara berkesinambungan dan terus –menerus, peranan pemerintah tidak bisa dilepaskan dalam upaya tersebut, sebagai pembuat kebijakan “regulator”, memiliki peranan yang strategis dalam rangka untuk memaksimalkan peran serta masyarakat secara seimbang, Ekowisata dalam beberapa tahun terakhir

berkembang karena ada kejenuhan yang melanda para wisatawan dengan model “replikatif” pariwisata yang terkesan tidak alami. Kondisi tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan konsep pariwisata di wilayah pedesaan, karena berpotensi untuk berkembang secara pesat. (Dias Satria, 2009).

Menurut Rustiadi Pemanfaatan sumberdaya yang ada di wilayah pedesaan, dengan berbasis potensi wilayah secara optimal, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, tentunya dengan cara yang berkesinambungan. Perwujudan tersebut, dilakukan dengan pengkondisian desa melalui beberapa pendekatan, diantaranya- nya:

- a. Perubahan harus disikapi dengan bijaksana, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar tidak menimbulkan efek negatif;
- b. Adanya komitmen bersama dalam pelaksanaan dokumen pembangunan masyarakat yang sudah disepakati.

Berangkat dari kondisi tersebut maka penataan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah pedesaan, harus terus diupayakan, supaya dapat menyelesaikan persoalan –persoalan yang ada di desa. Program pembangunan melalui “Desa Membangun”, banyak menekankan pada proses perencanaan yang benar –benar maksimal, sehingga dapat menjawab persoalan –persoalan yang terjadi, serta bisa memanfaatkan peluang yang ada, secara teliti, terlebih lagi kesemuanya harus menitikberatkan pada pola yang partisipatif, melaluiupaya “ urun rembug” dengan seluruh pembuat kebijakan “steakholder” Yang ada di wilayah Desa (Bachrein 2010).

Konsep tersebut bisa kita lihat dalam beberapa contoh model pengembangan pariwisata yang ada di desa, yang sangat unik dan menjanjikan bagi masyarakat sekitar, sehingga dengan keberadaan desa wisata bisa memicu percepatan kenaikan sektor – sektor lainnya, terutama dalam hal pembangunan masyarakat dan juga perekonomiannya.

Ekowisata sebagai sebuah program kepariwisataan, perlu mengingat keberadaan alam yang akan dijadikan sebagai obyek, sehingga perlu konsep keseimbangan ekosistem yang baik, guna mempertahankan keanekaragaman unsur penyusunnya. Model –model pengembangan desa wisata yang dibuat merupakan sebuah desain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing desa, namun demikian tidak semua model bisa diaplikasikan, sehingga perlu dibuat sebuah analisis secara mendalam, terkait model atau konsep desa wisata yang dapat digunakan di semua daerah, dan memiliki mekanisme atau kelembagaan yang lebih teratur dan dinamis.

Pembangunan desa yang dilakukan secara terpadu, inovatif serta kreatif,

merupakan pola dari program pembangunan yang berangkat dari proses pemetaan potensi sumberdaya alam dan masyarakat, yang akan membentuk dan mengarahkan pada keterlibatan semua unsur atau elemen, setelah dibuat sebuah perencanaan kemudian desa mencoba membuat perpaduan atau kolaborasi terhadap elemen –elemen pembuat kebijakan untuk menentukan titik temunya. Sehingga hal ini akan memperkuat kebijakan yang lahir dari kegiatan musyawarah , dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan yang telah disepakati (Sofianto, 2012).

Dwipayana dan Eko (2003) menjelaskan bahwa apabila konsep *good governance* diletakkan dalam lingkup desa maka ada dua isu strategis yang penting untuk diperhatikan. Pertama, isu pemerintahan demokratis (*democratic governmance*), yaitu pemerintah desa yang berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi oleh masyarakat, dan kemudian dimanfaatkan sebaik -baiknya untuk responsivitas masyarakat itu sendiri. Kedua, hubungan antar elemen *governance* di desa berdasarkan pada prinsip kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan dalam melakukan pembangunan desa secara kolektif untuk mencapai kebaikan bersama (*common good*) (Sidik, 2015).

Berangkat dari kewenangan pemerintah desa, maka di sini ada kesempatan bagi desa untuk melaksanakan pembangunan, melalui regulasi yang dapat dijalankan supaya pemerintah desa dapat membuat produk hukum, yang sesuai dengan kebutuhan, oleh sebab itu aturan–aturan yang nantinya dihasilkan bisa benar –benar jadi sebuah terobosan, untuk mengembangkan potensi desa.

Amanat Undang –Undang pasal 1, ayat (2), Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, menjelaskan, bahwa, penyelenggaran urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di level desa kemudian disebut pemerintah desa, disini Kepala desa dan Perangkat desa, menjalankan roda pemerintahan, berdasarkan asas –asas, diantaranya: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Menurut Moch Solekhan pemerintah Desa berfungsi untuk melaksanakan pembangunan dan juga pembinaan terhadap kemasyarakatan, dan upaya untuk kemajuan perekonomian Desa (Queen & Widi, 2016).

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa terkait pengejawantahan dari salah satu fungsi yang dimiliki, bisa dilakukan melalui pengembangan dan pembinaan masyarakat di bidang kepariwisataan, hal tersebut bisa digagas di tataran desa, mengingat dalam beberapa tahun terakhir, fenomena desa wisata marak di negeri ini, kebijakan kepariwisataan lokal, bisa dilakukan melalui

kebijakan–kebijakan desa, melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau melalui karang taruna. Pada prinsipnya penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa dalam upaya pembangunan dan juga pengembangan masyarakat di sektor pariwisata menekankan pada upaya yang terlembaga, sistematis, dan berangkat dari aspirasi atau kebutuhan di kalangan masyarakat, melalui proses penggalian potensi lokal yang identik dengan kearifan lokal, dengan cara melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga bersifat partisipatif.

Praktik pelembagaan pariwisata di desa, nantinya akan menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas, sesuai dengan harapan semua masyarakat. Memaknai pariwisata perdesaan dengan menunjukkan suatu lingkungan geografis tempat terjadi / berlangsung nya aktivitas pariwisata dan karakteristik asli berupa budaya tradisional, budaya pertanian, lanskap pedalaman, dan gaya hidup sederhana. Konteks ruang (space) menjadi penting untuk memposisikan aktivitas dan implikasi perkembangan pariwisata perdesaan (Raharjana, 2012).

Pengembangan desa wisata secara eksplisit menjelaskan tentang upaya kegiatan kepariwisataan yang berkaitan dengan berbagai jasa pelayanan sehingga diperlukan berbagai upaya kerjasama dengan elemen – elemen, seperti: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Upaya membangun pariwisata dengan cara mendorong peran masyarakat menjadi hal vital (Raharjana, 2012).

Kelembagaan pariwisata, merupakan sebuah upaya untuk memperkuat program pariwisata di desa, mulai dari proses pembuatan kebijakan, pengaturan kewenangan, sistem organisasi dan pola komunikasi elemen yang terlibat dalam teknis penyelenggaraan pariwisata di desa, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan potensi wilayah, hingga penentuan model serta jenis wisata yang akan diterapkan, setelah itu kemudian diidentifikasi permasalahan – permasalahan yang dapat mengancam atau mengganggu jalannya kepariwisataan di desa, yang terakhir yaitu proses pelaksanaan program pariwisata dan evaluasi dalam tahapan ini juga dimasukan item – item seperti publikasi dan evaluasi berkala, untuk memaksimalkan efek yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Ada satu hal lagi yang dianggap penting, yakni soal pendanaan program pariwisata, hal ini penting, mengingat pengembangan wisata memerlukan sumber dana yang harus dikeluarkan, untuk mempersiapkan beberapa komponen pendukung atau pokok dalam sebuah desa wisata.

Pemahaman terkait konsep pariwisata sangat penting mengingat hal tersebut akan menjadi dasar penentuan model kepariwisataan yang akan diterap- kan di sebuah desa, sehingga nantinya program desa wisata yang

digalakkan akan benar – benar efisien dan efektif serta memberikan *multipe-effect* bagi kehidupan masyarakat, untuk kehidupan yang lebih baik.

Menurut Murdiyanto (2011:91) “secara esensial desa wisata merupakan pengembangan suatu desa dengan memanfaatkan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dan desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata menjadi satu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu dan memiliki tema tertentu sesuai dengan karakteristik desa”.

Komponen – komponen yang terdapat dalam masyarakat memiliki fungsi sebagai item produk kepariwisataan, sehingga menjadi rangkaian aktivitas wisata yang terpadu sehingga menjadi karakteristik yang unik, sesuai dengan kondisi masyarakat, geografis serta sosial budaya setempat (Winasis, 2016).

Konsep *Village Tourism* atau Desa wisata, merupakan pengembangan sebuah wilayah yang di optimalkan sesuai dengan karakteristik yang ada sehingga menjadi sebuah produk, item tersebut yang kemudian di pasarkan secara luas dengan keutamaannya, dimana disitu terdapat kehidupan masyarakat pedesaan dengan segala aktifitasnya menjadi sebuah kegiatan kepariwisataan (Abdur Rohim, 2013).

Pemanfaatan desa untuk pengembangan pariwisata, dapat digambarkan sebagai proses panjang, sehingga perlu untuk memahami, potensi dan kearifan lokal yang dimiliki masing – masing desa, tujuannya sebenarnya sangat sederhana, hal ini terkait dengan pemilihan atau penentuan jenis wisata di desa tersebut.

Daerah tujuan wisata yang menarik minat pengunjung, sehingga diperlukan upaya pengembangan sarana dan prasarana penunjang, sehingga terkuak beberapa alasan, diantaranya:

- a. *Pleasure tourism*, pengunjung berorientasi untuk menikmati perjalanan sehingga mereka ketika meninggalkan rumahnya untuk kepentingan berlibur, maka akan berusaha untuk mencari udara segar sehingga ketegangan yang dirasakan bisa hilang, dengan panorama dan juga keindahan alam yang dikunjungi.
- b. *Recreation sites*, mereka akan benar – benar berlibur dan meninggalkan semua aktifitas kesehariannya supaya dapat memperoleh kebugaran secara fisik dan batin.
- c. *Cultural tourism*, yakni upaya wisatawan yang ingin belajar sebuah budaya, untuk tujuan pengetahuan atau menyalurkan bakat dan minatnya.
- d. *Sport Tourism*, kegiatan wisatawan yang lebih menonjolkan aktifitas untuk menjaga kebugaran dan juga mencoba hal– hal baru yang mungkin tidak terdapat di daerah asalnya.
- e. *Business Tourism*, aktifitas wisata yang dilakukan untuk kepentingan

bisnis, misalnya berdagang atau untuk membeli barang – barang yang ada di suatu Negara, untuk dijual kembali kenegara asalnya.

- f. *Conventions Tourism*, jenis aktivitas pariwisata yang menekankan pada bangunan – bangunan yang menopang kegiatan pariwisata, seperti hotel dan bangunan lainnya (Susilowati.2004).

2. Kelembagaan Desa Wisata

Praktik kelembagaan kebijakan pariwisata di desa, menitikberatkan pada upaya sistematis yang terukur, dengan menekankan pada proses demokratisasi yang terukur, tentunya dengan melibatkan semua *steakholder* mulai dari pemerintah daerah (di level provinsi, kabupaten / kota), pemerintahan desa (karang taruna, kelompok sadar wisata, maupun Bumdes). Pengusaha, Media massa, serta masyarakat, yang dilakukan secara demokratis, untuk melahirkan sebuah kebijakan yang sinergis dan dapat diukur, sehingga kebijakan yang lahir bisa mewakili semua kepentingan *steakholder*, dengan tujuan untuk kemaslahatan bangsa, *stakeholder* selain berperan dalam proses pengambilan keputusan, nantinya di tataran teknis lapangan, saling bahu – membahu dan bersinergi untuk saling mengontrol kegiatan desa wisata, supaya kebijakan tersebut bisa berjalan dengan optimal.

Sistem Pemerintahan dengan model desentralisasi membentuk sebuah pola dalam ranah desa, dimana desa bisa memanfaatkan potensi dan juga modal sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui praktik kelembagaan yakni dengan cara pembuatan kebijakan Pariwisata. Melalui sektor ini harapannya masyarakat desa bisa berdaya dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

Cara pelebagaan sebuah kebijakan yang baik, diantaranya harus dapat dilakukan secara bersinergi, antar lembaga dengan masyarkaak melalui para *steakholder* atau pengambil kebijakan yang terlibat langsung, guna menemukan kemitraan dan juga pola organisasi pemerintahan yang relevan dengan kondisi desa.

Relevansi konsep tersebut ditekankan pada peranan masing – masing elemen, dalam proses awal hingga akhir dalam sebuah kebijakan, sehingga dapat dipadukan dan dijalankan secara bersinergi. Selain itu, aspek transparansi, dan proses yang partisipatif harus menjadi semangat dari pembuatan kebijakan, sehingga kelembagaan yang terbentuk dapat di implementasikan secara kontekstual dengan keadaan yang diharapkan bersama.

Pada kapasitas kelembagaan pengelola desa wisata ada 4 aspek yang esensial dalam pengembangan desa wisata. ialah pengembangan destinasi, pengembangan industri, pengembangan pemasaran, serta struktur kelembagaan.

Keberadaan suatu kelembagaan spesial yang menanggulangi pengelolaan desa wisata sesungguhnya menggambarkan perihal yang berarti. Terlebih kapasitas manajerial dari pengelola desa wisata juga menggambarkan suatu aspek yang dinilai dalam mengklasifikasikan desa wisata.

3. **Kemitraan Desa Wisata**

Pengembangan potensi wisata diharapkan dapat memberi manfaat pada destinasi pariwisata dan masyarakat lokal. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberi solusi terhadap dampak yang akan ditimbulkan terhadap budaya dan pariwisata dari perubahan pola perjalanan wisata adalah melalui pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan, kemitraan dan penguatan kelembagaan.

Pengembangan desa wisata memiliki tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum tersebut adalah hadirnya bentuk pembangunan pariwisata yang bersinergi dengan budaya lokal dan pembangunan berkelanjutan, menyesuaikan dengan situasi kekinian, pemerataan serta memperluas pembangunan potensi lokal. Sedangkan tujuan khusus merumuskan strategi pemberdayaan; menemukan bentuk kemitraan; serta menyusun/memformulasikan model penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung pengembangan Desa sebagai desa wisata.

Pengembangan potensi wisata diharapkan dapat memberi manfaat pada destinasi pariwisata dan masyarakat lokal. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberi solusi terhadap dampak yang akan ditimbulkan terhadap budaya dan pariwisata dari perubahan pola perjalanan wisata adalah melalui pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan, kemitraan dan penguatan kelembagaan.

Pengembangan desa wisata memiliki tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum tersebut adalah hadirnya bentuk pembangunan pariwisata yang bersinergi dengan budaya lokal dan pembangunan berkelanjutan menyesuaikan dengan situasi kekinian, pemerataan serta memperluas pembangunan potensi lokal. Kemudian pemanfaatan potensi lokal dalam pembangunan pariwisata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Fakultas Teknik UGM, 1992: 3)

Untuk itulah atraksi di desa wisata ditujukan pada pengembangan budaya dan alam desa. Berdasarkan potensi desa, beragam atraksi dapat dikembangkan yaitu aktivitas persawahladangan, kesenian tradisional, permainan tradisional, arsitektur tradisional, serta budaya lokal. Jika ini terjadi, maka pengembangan desa wisata lebih memanfaatkan potensi desa. Fasilitas wisata yang disediakan harus menampilkan potensi desa. Desa dengan segala potensinya bukan saja

dijadikan daya tarik wisata, akan tetapi keunikan serta keaslian yang berkaitan dengan cara hidup masyarakat desa perlu disajikan. Dengan demikian masyarakat dapat berperan dalam menjaga keberlanjutan desa wisata.

Selain penerapan strategi, keberhasilan pengembangan Desa Wisata dapat dilihat dari keberhasilan pemberdayaan (budaya, lingkungan, dan ekonomi tumbuh) dari masyarakat desa setempat; penerimaan kehadiran desa wisata oleh masyarakat Desa Wisata; kemampuan mengembangkan dan membentuk jaringan desa wisata lain di dalam dan di luar daerah desa berada; semua pelayanan memenuhi standar bidang pariwisata; terbentuknya kelembagaan (ancillary) yang akan mengelola Desa Wisata, karena sektor pariwisata meliputi kegiatan yang kompleks dan multi sektor, maka isu berikutnya yang tidak kalah menariknya untuk dikemukakan adalah isu koordinasi (baik koordinasi internal maupun eksternal) dalam pengelolaan desa wisata. Peningkatan daya saing produk perlu melibatkan aktor utama yang ada di balik pengembangan desa wisata. Peran aktor utama tersebut merupakan isu strategis, karena dari aktor utama inilah kontribusi dalam pengembangan desa wisata akan berawal

Pengembangan suatu Desa Wisata tidak saja mengedepankan keuntungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, yang terpenting adalah keberlanjutan budaya dan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan pengembangan Desa Wisata, maka diperlukan kemitraan.

Dalam pengembangan desa wisata, ada sejumlah aktor utama yang dapat diidentifikasi antara lain: Kementerian Pariwisata, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa), Asosiasi Profesi Pariwisata, Usaha Pariwisata, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Masyarakat, Media Massa, dan Lintas Departemen. Masing-masing aktor ini diharapkan akan memberikan kemudahan terutama terkait dengan penentuan peran serta fungsi masing-masing terkait dengan keterlibatannya dalam desa wisata. Masing-masing aktor bermitra guna memberikan kontribusi yang optimal bagi upaya mendorong keberhasilan sebuah desa wisata.

Penanganan yang komprehensif diperlukan terhadap berbagai isu (seperti pengelolaan, komodifikasi, koordinasi, dan aktor utama) sebagai sub sistem dalam kemitraan desa wisata. Melalui penanganan yang komprehensif tersebut akan hadir desa wisata yang dapat mensejahterakan masyarakat desa. Harapan tersebut akan tercapai apabila kualitas pengalaman wisatawan selama berwisata di desa wisata dapat ditingkatkan, dihasilkannya sumber daya manusia yang kompeten, dilakukannya survei terhadap produk yang dihasilkan oleh desa wisata, terhindarnya wisatawan dari dampak negatif oleh masyarakat lokal dan lingkungan (resources stewardship), terciptanya lingkungan usaha di desa wisata yang lebih baik melalui visi, misi, strategi, program serta kebijakan yang jelas serta dilaksanakan oleh Stakeholders.

Struktur organisasi pengelola desa wisata sebagai cerminan dari kelembagaan desa wisata, saat ini diisi oleh pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

- a. Strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh pengelola suatu Desa Wisata adalah mempergunakan Model Kesesuaian yang berintikan kesesuaian antara tiga elemen yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program
- b. Model Penguatan Kelembagaan dalam rangka mendukung pengembangan Desa Wisata adalah melalui
 - 1) Pelibatan seluruh lapisan masyarakat desa serta Lembaga yang ada di desa dalam kaitan mendukung pengembangan sebagai desa wisata berbasis alam, budaya maupun ekonomi kreatif; dan
 - 2) merevitalisasi kelompok yang menghasilkan produk wisata untuk memperkuat pengembangan suatu Desa Wisata.
- c. Mengacu pada strategi pemberdayaan yang dirumuskan dengan mempergunakan Model Kesesuaian, maka program-program yang disusun terkait operasionalisasi Desa Wisata agar mengacu pada potensi alam, budaya, dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Desa tersebut. Kemitraan yang terjadi diantara Stakeholders Desa Wisata diharapkan mampu menghasilkan program yang dapat mensejahterakan masyarakat Desa. Untuk memperkuat kelembagaan, pengelolaan Desa Wisata agar melibatkan seluruh lembaga di masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

4. Sadar Wisata dan Sapta Pesona

Pariwisata merupakan salah satu upaya menjawab tantangan kebutuhan wisatawan akan jenis wisata pedesaan. Pelatihan sadar wisata bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai aset dan sekaligus penggerak utama desa wisata. Sebuah desa wisata dengan segala potensi yang dimiliki tidak akan mampu tumbuh dan berkembang tanpa keterlibatan masyarakat di dalamnya.

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pengembangan destinasi (Evans et al., 2003). Sehingga upaya peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi sadar wisata masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui dan sapta-pesona, sehingga masyarakat mempunyai pemahaman pariwisata dan kesadaran untuk berkontribusi dalam pengembangan pariwisata.

Permasalahan mendasar yang biasa dihadapi pengelola destinasi wisata, yakni:

- a. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pariwisata untuk mendukung perekonomian masyarakat.
- b. Masyarakat belum mempunyai pemahaman tentang sapta-pesona.
- c. Masyarakat belum mempunyai pemahaman tentang desa wisata.

Metode sosialisasi kepada masyarakat mengenai sadar wisata, sapta-pesona, dan desa wisata, bisa dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan pendekatan partisipatif:

- a. Metode ceramah dilaksanakan dengan memberikan paparan materi untuk memberikan pengetahuan mengenai sadar wisata, sapta-pesona, dan desa wisata, sehingga masyarakat memahami ruang lingkup materi dengan jelas (Sanjaya, 2006).
- b. Metode partisipatif bertujuan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk aktif bertanya dan menjawab pertanyaan, sehingga materi yang disampaikan lebih cepat diserap (Mikkelsen, 2003).

Materi Sosialisasi diberikan terbagi dalam tiga kelompok, yakni sadar wisata, sapta-pesona, dan desa wisata, sebagai berikut:

- a. Materi Sadar Wisata

Materi sadar wisata yang disampaikan, meliputi:

- 1) Pengetahuan dasar pentingnya pariwisata sebagai bagian dari pembangunan sebuah desa. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian, karena dampak ganda yang ditimbulkan dari aktivitas wisata (Wahab and Piagram, 1997). Pariwisata yang berkembang memberikan berbagai peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
- 2) Unsur-unsur pentahelix yang sangat mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata. Pentahelix merupakan model sinergitas yang sangat tepat untuk diimplementasikan guna mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama (Soemaryani, 2016). Unsur pentahelix yang menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata, meliputi: media, akademisi, industri pariwisata, komunitas, dan pemerintah. Masyarakat dalam model pentahelix masuk dalam kelompok komunitas, yang mempunyai kontribusi sangat besar, karena sebagai motor penggerak dalam pembangunan desa wisata.
- 3) Memahami wisatawan. Masyarakat sebagai pelaku utama harus mempunyai pemahaman yang kuat tentang wisatawan. Wisatawan merupakan seseorang yang melakukan perjalanan dari tempat

asalnya menuju tempat yang baru untuk melakukan aktivitas wisata sementara waktu (Pendit, 2003). Pemahaman tentang wisatawan sangat penting karena wisatawan merupakan sumber permintaan wisata dan penentu kelangsungan hidup sebuah destinasi wisata.

- 4) Konsep dasar sadar wisata. Masyarakat mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi dalam mewujudkan iklim kondusif dalam pengembangan pariwisata. Dalam hal ini Masyarakat mempunyai dua peran, yakni sebagai tuan rumah dan wisatawan. Masyarakat sebagai tuan rumah, berperan serta aktif menciptakan sapta-pesona, sedangkan sebagai wisatawan mampu mengenali potensi pariwisata dan ikut menggerakkan mata rantai pariwisata.
- b. Materi Sapta-Pesona Materi sapta-pesona mengulas tujuh unsur dalam sapta pesona (Arevin, 2007), meliputi:
- 1) Aman. Suasana yang membuat wisatawan merasa senang, tidak takut, tentram, dan nyaman.
 - 2) Tertib. Kondisi lingkungan yang mencerminkan sikap disiplin dan kualitas layanan, sehingga memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berwisata.
 - 3) Bersih. Kondisi lingkungan yang terpelihara kebersihannya dan terbebas dari berbagai macam sampah.
 - 4) Sejuk. Kondisi lingkungan yang menawarkan suasana segar, sehat, dan nyaman.
 - 5) Indah. Kondisi lingkungan yang mencerminkan keindahan, yakni teratur, rapi, dan serasi.
 - 6) Ramah. Sikap dan perilaku yang penuh keakraban, peduli, sopan dalam komunikasi, murah senyum, suka menyapa, dan bersedia membantu tanpa pamrih.
 - 7) Kenangan. Pengalaman yang diperoleh wisatawan selama beraktivitas wisata, yang memberikan kesan mendalam.
- c. Materi desa wisata yakni untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan prospek dari pengembangan desa wisata. Materi ini untuk memberikan gambaran implementasi sapta-pesona di desa wisata. Materi tentang desa wisata, meliputi:
- 1) Perbedaan desa wisata dan wisata desa. Desa wisata meliputi semua potensi yang dimiliki sebuah desa dan dikemas menjadi paket wisata, yang pengelolaannya melibatkan masyarakat setempat. Sedangkan Wisata desa merupakan sebuah objek wisata yang dimiliki dan ditawarkan oleh sebuah desa.

- 2) Komponen atau unsur desa wisata, meliputi:
 - a) Batasan geografis ataupun administratif yang jelas.
 - b) Potensi daya tarik wisata (alam, budaya, dan karya kreatif).
 - c) Masyarakat antusias dan memiliki komitmen.
 - d) Fasilitas pariwisata.
 - e) Sarana dan prasarana lingkungan.
 - f) Organisasi pengelolaan desa wisata.
 - g) Sumber daya manusia.
- 3) Konsep pengembangan desa wisata Pengembangan desa wisata dilakukan menggunakan konsep Tri-Daya, yakni:
 - a) Membangkitkan daya pembangunan agar tercipta lingkungan yang lestari.
 - b) Membangkitkan daya ekonomi agar tercipta masyarakat yang produktif.
 - c) Membangkitkan daya sosial agar tercipta masyarakat yang efektif.
- 4) Mengenali potensi desa Wisatanya sendiri
Para peserta diajak untuk berdiskusi mengenali potensi pariwisata yang dimiliki desanya sendiri untuk dijadikan sebagai modal pengembangan desa wisata. Potensi yang dimiliki dikemas dengan baik menjadi sebuah paket wisata yang menarik wisatawan.

Desa wisata mampu bertahan apabila didukung dengan sumber daya manusia. Upaya peningkatan SDM harus dilakukan terus-menerus dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya pemerintah, pihak swasta, dan akademisi, Selain itu, setiap desa wisata harus mempunyai keunikan yang bisa menjadi daya tarik utama, serta tidak dimiliki oleh desa wisata lain.

Persaingan dalam industri pariwisata semakin meningkat dan menuntut para pengelola destinasi wisata untuk pandai mensiasati kondisi tersebut. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memenangkan persaingan, yakni melalui diferensiasi produk dan melakukan inovasi produk. Sebuah destinasi wisata harus mampu menawarkan produk yang berbeda dan menawarkan keunikan yang tidak dimiliki desa lain. Dewasa ini banyak bermunculan desa wisata, namun aktivitas wisatanya bersifat duplikasi sehingga tidak mampu memberikan daya tarik bagi wisatawan. Harus selalu ada yang baru dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Dengan Penyelenggaraan pelatihan akan mampu membuka kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan desa wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menumbuhkan keinginan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengembangan desa wisata.

Kebanyakan desa wisata, mempunyai kendala utama yakni sumber daya manusia yang belum memadai. Masyarakat sebagai motor penggerak utama desa wisata belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan desa wisata. Mayoritas masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagai petani dengan pendapatan yang relatif terbatas. Selain itu, sebagai petani masih mempunyai banyak waktu luang, namun belum mempunyai kesadaran untuk memanfaatkan waktu tersebut dengan terlibat dalam pengelolaan desa wisata yang tentunya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Pelatihan ini memberikan tambahan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan.

Menurut Rahim (2012, online) “Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya”. Sadar Wisata ialah bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam 2 (dua) hal berikut.

- a. Masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah (host) yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif sebagaimana tertuang dalam slogan Sapta Pesona.
- b. Masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata, sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air.

Dalam dunia pariwisata, atraksi, aktivitas, serta lingkungan adalah beberapa hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari pariwisata itu sendiri. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang meliputi beberapa aspek penting dan saling terkait dimana objek wisata lengkap sebagai daya tarik wisata beserta aktivitas wisatanya, menimbulkan keterkaitan dengan lingkungan.

Selain itu kita juga harus menciptakan suasana indah, bersih, aman dan ramah dimana saja mengingat wisatawan yang berkunjung bukan hanya ingin menikmati objek wisata, tetapi mereka juga memperhatikan tentang kebersihan pada objek tersebut serta ingin melihat keramahan masyarakat dalam menyambut pendatang di daerahnya dan juga tingkat keamanan yang diperhatikan pada objek wisata tersebut apakah sudah mencapai tingkat keamanan yang sesuai agar wisatawan merasa aman saat berkunjung, untuk mengetahui sejauh mana masyarakat di sekitar objek wisata memahami tentang Sadar Wisata.

Proses pembangunan pariwisata hendaknya berjalan seiring dengan peningkatan Sadar Wisata masyarakat, demikian pula proses penciptaan Sapta Pesona haruslah berjalan dengan baik. Unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan yang terkandung di dalam Sapta Pesona Pariwisata merupakan nilai-nilai yang bersifat universal. Artinya nilai-nilai tersebut dapat diterima oleh semua orang di manapun ia berada. Oleh karena itu, Sapta Pesona Pariwisata dengan unsur-unsurnya sebaiknya dilaksanakan oleh seluruh pihak, dalam kehidupan sehari-hari secara konsekuen dan konsisten.

Sapta Pesona adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur Sapta Pesona yang dimaksud di atas adalah: 1) Aman, 2) Tertib, 3) Bersih, 4) Sejuk, 5) Indah, 6) Ramah, dan 7) Kenangan.

Sapta pesona adalah tujuh unsur atau kondisi yang dapat meningkatkan daya pariwisata, yaitu:

- a. Aman. Menciptakan keadaan lingkungan dan suasana yang membuat seseorang merasa tenang, tidak merasa takut atas keselamatan jiwa dan raga, serta bebas dari tindak pidana, kekerasan, dan ancaman, misalnya pencopetan, penipuan, penjarahan dan pemerkosaan. Wisatawan akan senang berkunjung ke suatu tempat apabila merasa aman, tenteram, tidak takut, terlindungi dan bebas dari :
 - 1) Tindak kejahatan, kekerasan, ancaman, seperti kecopetan, pemerasan, penodongan, penipuan dan lain sebagainya.
 - 2) Terserang penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya
 - 3) Kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik, seperti kendaraan, peralatan, untuk makan dan minum, lift, alat perlengkapan rekreasi atau olah raga.
 - 4) Gangguan oleh masyarakat, antara lain berupa pemaksaan oleh pedagang asongan tangan jail, ucapan dan tindakan serta perilaku yang tidak bersahabat dan lain sebagainya. Jadi, aman berarti tejamin keselamatan jiwa dan fisik, termasuk milik (barang) wisatawan
- b. Tertib. Kondisi yang tertib merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang termasuk wisatawan. Kondisi tersebut tercermin dari suasana yang teratur, rapi dan lancar serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam semua segi kehidupan masyarakat, misalnya :
 - 1) Lalu lintas tertib, teratur dan lancar, alat angkutan datang dan berangkat tepat pada waktunya.
 - 2) Tidak nampak orang yang berdesakan atau berebutan untuk

- mendapatkan atau membeli sesuatu yang diperlukan
- 3) Bangunan dan lingkungan ditata teratur dan rapi
 - 4) Pelayanan dilakukan secara baik dan tepat
 - 5) Informasi yang benar dan tidak membingungkan
- c. Bersih Bersih merupakan suatu keadaan/kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit dan pencemaran. Wisatawan akan merasa betah dan nyaman bila berada di tempat-tempat yang bersih dan sehat seperti :
- 1) Lingkungan yang bersih baik di rumah sendiri maupun di tempat-tempat umum, seperti di hotel, restoran, angkutan umum, tempat rekreasi, tempat buangair kecil/besar dan lain sebagainya. Bersih dari sampah, kotoran, corat-coret dan lain sebagainya.
 - 2) Sajian makanan dan minuman bersih dan sehat
 - 3) Penggunaan dan penyajian alat perlengkapan yang bersih seperti sendok, piring, tempat tidur, alat olah raga dan lain sebagainya
 - 4) Pakaian dan penampilan petugas bersih, rapi dan tidak mengeluarkan bau tidak sedap dan lain sebagainya
- d. Sejuk Lingkungan yang serba hijau, segar, rapi memberi suasana atau keadaan sejuk, nyaman dan tenteram. Kesejukan yang dikehendaki tidak saja harus berada di luar ruangan atau bangunan, akan tetapi juga di dalam ruangan, misalnya ruangan kerja, ruangan makan, ruangan tidur dan lain sebagainya. Untuk itu hendaklah kita semua :
- 1) Turut serta aktif memelihara kelestarian lingkungan dan hasil penghijauan yang telah dilakukan masyarakat maupun pemerintah
 - 2) Berperan secara aktif untuk meng anjurkan dan memelopori agar masyarakat setempat melaksanakan kegiatan penghijauan dan memelihara kebersihan, menanam berbagai tanaman di halaman rumah masing-masing baik untuk hiasan maupun tanaman yang bermanfaat bagi rumah tangga, melakukan penanaman pohon/ tanaman rindang di sepanjang jalan di lingkungan masing-masing di halaman sekolah dan lain sebagainya
 - 3) Membentuk perkumpulan yang tujuannya memelihara kelestarian lingkungan.
 - 4) Menghiasi ruang belajar/kerja, ruang tamu, ruang tidur dan tempat lainnya dengan aneka tanaman penghias atau penyejuk.
 - 5) Mempraktisai berbagai kegiatan dan upaya lain yang dapat membuat lingkungan hidup kita menjadi sejuk, bersih, segar dan nyaman.

- e. Indah Keadaan atau suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik dan sedap dipandang disebut indah. Indah dapat dilihat dari berbagai segi, seperti dari segi tata warna, tata letak, tata ruang bentuk ataupun gaya dan gerak yang serasi dan selaras, sehingga memberi kesan yang enak dan cantik untuk dilihat. Indah yang selalu sejalan dengan bersih dan tertib serta tidak terpisahkan dari lingkungan hidup baik berupa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun hasil karya manusia. Karena itu kita wajib memelihara lingkungan hidup agar lestari dan dapat dinikmati oleh umat manusia.
- f. Ramah tamah. Ramah tamah merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan keakraban, sopan, suka membantu, suka tersenyum dan menarik hati. Ramah tamah tidaklah berarti bahwa kita harus kehilangan kepribadian kita ataupun tidak tegas dalam menentukan sesuatu keputusan atau sikap. Ramah, merupakan watak dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya, yang selalu menghormati tamunya dan dapat menjadi tuan rumah yang baik. Sikap ramah tamah ini merupakan satu daya tarik bagi wisatawan, oleh karena itu harus kita pelihara terus.
- g. Kenangan. Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Kenangan dapat berupa yang indah dan menyenangkan, akan tetapi dapat pula yang tidak menyenangkan. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berpariwisata di Indonesia, dengan sendirinya adalah yang indah dan menyenangkan. Kenangan yang indah ini dapat pula diciptakan dengan antara lain :
 - 1) Akomodasi yang nyaman, bersih dan sehat, pelayanan yang cepat, tepat dan ramah, suasana yang mencerminkan ciri khas daerah dalam bentuk dan gaya bangunan serta dekorasinya
 - 2) Atraksi seni budaya daerah yang khas dan mempesona baik itu berupa seni tari, seni suara dan berbagai macam upacara
 - 3) Makanan dan minuman khas daerah yang lezat, dengan penampilan dan penyajian yang menarik. Makanan dan minuman ini merupakan salah satu daya tarik yang kuat dan dapat dijadikan jati diri (identitas daerah).
 - 4) Cenderamata yang mungil yang mencerminkan ciri-ciri khas daerah bermutu tinggi, mudah dibawa dan dengan harga yang terjangkau mempunyai arti tersendiri dan dijadikan bukti atau kenangan dari kunjungan seseorang ke suatu tempat/daerah/ Negara

Tindakan yang dilakukan anggota POKDARWIS perlu melakukan koordinasi antar anggota secara rutin, karena dirasakan mereka perlu

mengompakkan diri sebagai sebuah organisasi, tugas dan fungsi POKDARWIS sebagai penyadar masyarakat, menerapkan Sapta Pesona, antara pengelola dan pengurus wisata, kalau misal akan ada tamu yang datang, mereka selalu siap, memperhitungkan segala keperluan dan kebutuhan akan wisata, semua dijalankan oleh POKDARWIS.

Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata (2012:27-28, online) poin ke 1 dan 2, menerangkan bahwa :

- a. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota POKDARWIS dalam bidang kepariwisataan.
- b. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.

Bentuk pembinaan POKDARWIS menurut Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata (2012:35-36, online) ada dua model, yaitu:

- a. Pembinaan Langsung, pembinaan yang dilakukan dalam bentuk interaksi dan tatap muka langsung antara unsur Pembina dengan Pokdarwis sebagai pihak yang dibina. Bentuk pembinaan langsung tersebut dapat dilakukan melalui temu wicara, diskusi, pendidikan dan pelatihan/ workshop, lomba, jambore, dan lain-lain.
- b. Pembinaan Tak Langsung, pembinaan yang dilakukan oleh unsur Pembina melalui pemanfaatan media massa (baik media cetak maupun elektronik) maupun media publikasi lainnya. Bentuk pembinaan tak langsung tersebut dapat dilakukan melalui pemasangan media iklan layanan masyarakat di surat kabar atau layar TV atau di media ruang luar (outdoor) lainnya (misalnya: baliho, poster, spanduk, dan sebagainya).

Pertemuan dengan masyarakat lebih diintensifkan, perangkat desa, supaya terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik, penyampaian akan informasi juga akan lebih efektif. Hendaknya POKDARWIS bekerjasama dengan pihak swasta dalam berbagai bidang, agar kendala akan dana dan informasi dapat dikurangi. Pihak Desa juga jangan ragu dalam melibatkan para pemuda desa yang lain dalam setiap kegiatannya, agar proses regenerasi dapat berjalan dengan baik.

BAB III

Legalitas Lembaga Kelompok Desa

A. Penyiapan dan pengurusan legalitas desa wisata

Pemerintah telah mengarahkan adanya Lembaga Pengelola Wisata (POKDARWIS) yang bernaung di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Aspek Kebijakan Pariwisata Legalitas/kebijakan pembentukan organisasi BUM Desa dan POKDARWIS dinaungi melalui:

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Pasal 89 UU Desa, hasil usaha BUM Desa selain akan digunakan bagi pengembangan usaha BUM Desa itu sendiri, dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin.
3. Pasal 3 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 menegaskan Bahwa BUM Desa didirikan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan manfaat aset, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa, yang kesemuanya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

B. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

Salah satu cara peningkatan dan pengembangan pariwisata adalah membentuk Pokdarwis atau Kelompok sadar wisata yang dalam pengertiannya adalah menurut buku panduan pokdarwis yang diakses pada (www.kemenpar.go.id) Kelompok Sadar wisata (pokdarwis) adalah suatu kelompok organisasi informal yang beranggotakan masyarakat yang mempunyai kepentingan dan memiliki kepedulian terhadap daerah yang mempunyai potensi pariwisata dan tumbuh berkembang atas kesadaran, ketekunan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan pariwisata lokal didaerahnya untuk meningkatkan pembangunan pariwisata di daerah tersebut.

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pengembangan Desa Wisata adalah keberadaan Pokdarwis sebagai suatu institusi lokal yang bertanggung jawab untuk menjamin progress desa wisata. Pokdarwis harus memiliki struktur organisasi yang terdiri dari para pengurus harian (ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua seksi) serta anggota yang tidak lain adalah masyarakat desa itu sendiri. Pengaruh para pengurus harian ini terbilang kuat dalam mengatur setiap aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan desa wisata. Meskipun demikian, kehadiran masyarakat sebagai anggota Pokdarwis tetap penting sebagai panduan para pengurus harian dalam pengambilan keputusan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu peran dari Pokdarwis yang memiliki pengaruh nyata dalam mendukung perkembangan Desa Wisata adalah keberhasilan meningkatkan kualitas dan kuantitas program-program atraksi wisata, yang disuguhkan kepada para wisatawan. Peran yang dijalankan oleh Pokdarwis, biasanya akan memunculkan aktor-aktor tertentu yang memiliki dominansi peran dibanding dengan aktor lainnya. Hal ini dapat terjadi mengingat Pokdarwis memiliki pembagian tugas yang berbeda-beda untuk setiap aktor dalam merencanakan, melakukan implementasi, serta mengelola semua program pengembangan atraksi wisata. Adanya pembagian tugas dalam Pokdarwis ini memberikan manfaat tersendiri yaitu masyarakat selaku anggota dapat ikut terlibat dan berkontribusi untuk menciptakan dan memelihara eksistensi setiap atraksi wisata andalan di Desa Wisata Tembi. Keikutsertaan masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan *sense of belonging* (rasa memiliki) terhadap kemajuan desa wisata di masa yang akan datang.

Pada hakikatnya Pokdarwis dapat melaksanakan berbagai jenis kegiatan yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masing-masing kelompok. Namun semua jenis kegiatan tersebut harus diarahkan untuk:

1. Peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis;
2. Peningkatan kemampuan dan keterampilan pada anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata;
3. Mendorong atau memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan;
4. Mendorong atau memotivasi masyarakat untuk meningkatkan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya perwujudan Sapta Pesona
5. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat;
6. Memberikan masukan kepada aparat pemerintah yang berwenang dalam bidang kepariwisataan.

Esensi dari kehadiran institusi lokal dalam pengembangan desa wisata adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan manajerial usaha karena

pada dasarnya institusi lokal memiliki kewenangan yang sah untuk mengatur setiap aktivitas perencanaan dan pengembangan wisata dengan beberapa pedoman atau ketentuan-ketentuan yang mengikutinya (Rahmawati, 2006). Hal ini mengisyaratkan bahwa institusi lokal menjadi pihak yang diberi wewenang atau mandat oleh masyarakat setempat untuk bertindak dalam pengambilan keputusan. Institusi lokal diharapkan dapat melaksanakan mandat dengan bijak agar kepercayaan masyarakat tidak pudar dan masyarakat mengetahui setiap rencana atau rancangan dari institusi lokal tersebut. Oleh karena itu, fungsi kehadiran institusi lokal ini diharapkan dapat menjadi titik sentral dalam menciptakan komunikasi yang lancar dan berjalan secara dua arah. Dengan kata lain, Pokdarwis atau bentuk institusi lokal lain akan menjadi pihak yang tampil paling dominan di dalam penyelenggaraan suatu atau beberapa aktivitas pengembangan wisata sehingga Pokdarwis ini dapat menjadi local champion yaitu individu atau kelompok setempat dengan kepeloporannya yang tinggi mampu menggerakkan masyarakat untuk mendukung kinerja Pokdarwis dan berpartisipasi pada suatu aktivitas pengembangan wisata di daerah tempat tinggalnya (Departemen Perindustrian, 2005).

Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Program Atraksi Wisata. Peran institusi lokal tidak hanya mendukung keberhasilan di dalam internal lingkungan desa wisata yang dikelolanya saja, akan tetapi juga institusi lokal ini bisa meningkatkan daya saing desa wisata tersebut agar dapat bertahan dalam persaingan ketat di bidang pariwisata. Persaingan dalam aktivitas pariwisata dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk merebut suatu obyek strategis yaitu pasar, konsumen (para wisatawan), dan peluang untuk semakin dikenal lebih luas. Sedangkan daya saing adalah hasil puncak dari berbagai keunggulan dan nilai lebih yang dimiliki untuk membuat suatu desa wisata semakin dikenal dan memiliki pasaran yang luas (Frinces, 2011). Keberadaan suatu obyek wisata yang memiliki daya saing unggulan dibandingkan obyek yang lain menandakan bahwa obyek tersebut memiliki kesempatan memenangkan persaingan lebih besar terutama dalam merebut minat konsumennya.

Di dalam kegiatan desa wisata yang membutuhkan program-program yang berkualitas agar dapat menarik minat banyak wisatawan dan mendominasi kegiatan pariwisata di suatu daerah tentu dibutuhkan individu yang dapat berperan secara penuh sehingga dari kepeloporannya yang tinggi ini mampu membentuk ragam atraksi wisata yang atraktif dan menjadi cirri tersendiri yang tidak dimiliki oleh desa wisata yang lain.

Ada beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan oleh sebuah institusi lokal dalam memenangkan sebuah persaingan yaitu selalu berada di depan dibandingkan kompetitornya, selalu lebih unggul dari apa yang dimiliki oleh kompetitor, terdapat kerja sama yang solid antar anggota dan pengurusnya, memiliki

kreativitas dalam membuat produk unggulan yang baru, dan merencanakan strategi kebijakan yang tepat untuk merencanakan setiap pengembangan program yang telah disusun sebelumnya (Frinces, 2011)

Adanya bentuk-bentuk atraksi wisata baru menandakan bahwa pengurus Pokdarwis bisa bekerja sama dengan baik dalam mengupayakan suatu hiburan baru guna menarik lebih banyak minat dari wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun lokal. Atraksi wisata merupakan sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk datang melihat dan menikmati apa yang tersaji di Desa Wisata.

Keberhasilan para pengurus Pokdarwis dalam mengembangkan beragam atraksi wisata ini tidak lepas dari adanya koordinasi yang baik antar pengurus sendiri dan pengurus dengan masyarakat setempat yang memiliki kedudukan sebagai anggota Pokdarwis. Koordinasi antar seksi perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan atraksi wisata yang dibawahinya. Di dalam proses pengembangan atraksi wisata yang berkualitas setidaknya diperlukan dua hal pokok yaitu proses transfer ilmu pengetahuan antar pengurus Pokdarwis dan Peran Pokdarwis dalam peningkatan kualitas atraksi wisata.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Atraksi Wisata Suatu atraksi wisata akan berhasil dikembangkan manakala para pelaku atraksi itu memiliki pengetahuan dan skill yang mumpuni. Peningkatan skill dan pengetahuan ini sendiri tidak muncul begitu saja, ada beberapa proses transfer pengetahuan kepada pelaku yang sudah ahli kepada para generasi penerusnya. Proses transfer ilmu pengetahuan tersebut bertujuan agar terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata.

Jika kita amati, proses transfer ilmu pengetahuan dari pengurus kepada para anggota Pokdarwis (masyarakat) untuk meningkatkan kualitas SDM berhubungan erat dengan kegiatan pengembangan atraksi wisata. Ketika para anggota Pokdarwis memiliki kualitas yang prima maka atraksi wisata dapat berkembang dengan cepat. Para ketua masing-masing seksi bertindak sebagai lokal champion dalam proses transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan bertindak sebagai fasilitator bagi masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuan teknis dengan mengajarkan berbagai ilmu

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Atraksi Wisata Fasilitas pendukung dalam aktivitas pariwisata merupakan salah satu aspek yang krusial dalam mendukung kemajuan suatu desa wisata.

Para pengurus Pokdarwis berperan sebagai penggerak dalam memobilisasi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung serta mediator antara masyarakat dengan pihak swasta yang ada di desa khususnya dalam permohonan bantuan atau pinjaman dana untuk pembangunan *homestay* yang sifatnya milik kepentingan pribadi. Pengurus Pokdarwis yang paling

berperan dan menjadi lokal champion di dalam mendukung proses penyediaan fasilitas ini adalah ketua Pokdarwis. Ketua Pokdarwis lah yang paling terlihat dominan dalam mengkoordinasikan masyarakat untuk mau ikut berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas, baik memobilisasi pembayaran iuran serelanya untuk penyediaan fasilitas desa maupun mendorong ikut dalam proses pembuatan atau pembangunan suatu fasilitas.

Ketua Pokdarwis dibantu oleh masing- masing ketua seksi atraksi dalam mengkoordinasikan masyarakat untuk ikut gotong royong pada proses pembangunan suatu fasilitas. Bendahara berperan dalam mengkoordinasi pembayaran iuran seikhlasnya yang ditanggungkan kepada seluruh anggota Pokdarwis beserta pengurus hariannya. Sekretaris berperan dalam mencatat setiap progres penyediaan dan pembangunan suatu fasilitas. Masyarakat yang berperan sebagai pelaku atraksi wisata memiliki peranan dalam membantu melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh ketua Pokdarwis dan mendukung dalam pemberian dana yang dapat dipakai untuk pembangunan fasilitas baru.

Pengembangan program-program atraksi wisata tersebut terdiri dari pengembangan ragam atraksi wisata, peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung wisata, serta pengembangan sumber daya manusia.

Peran Pokdarwis dalam pengembangan Desa Wisata ini terbagi menjadi tiga bagian, dimana salah satu peran Pokdarwis yang krusial adalah dalam proses pengembangan program-program atraksi wisata. Peran tersebut tidak hanya dibebankan kepada para pengurus harian saja, akan tetapi masyarakat juga mengambil bagian didalamnya. Meskipun demikian, peran seksi yang memiliki tanggung jawab yang terbesar. Mereka diberi wewenang untuk mengelola dan membuat atraksi wisata di Desa Wisata. Kualitas dan kuantitas atraksi wisata inilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu Desa Wisata agar dapat terus bersaing dengan desa wisata di daerah lain. Keberhasilan tiap seksi dipengaruhi oleh masing-masing ketua seksi yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengembangan dan pengelolaan atraksi wisata. Kehadiran seorang ketua seksi yang berkompeten dapat menentukan seberapa besar kualitas dan kuantitas atraksi wisata yang mampu dikelolanya. Kualitas suatu atraksi wisata berbicara mengenai seberapa lama atraksi wisata ini dapat terus eksis dan menghibur setiap wisatawan yang berkunjung dan kuantitas berbicara mengenai ragam atau bentuk-bentuk atraksi wisata yang disuguhkan kepada para wisatawan agar dapat menghindari kesan monoton dari tahun ke tahun. Peran dari ketua seksi yang sedemikian besar ini menjadikan mereka sebagai lokal *champion* dari setiap kegiatan pengembangan dan pengelolaan atraksi wisata yang ada di Desa Wisata.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung

terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya. Gerakan sadar wisata ini merupakan sebuah konsep yang mengembangkan partisipasi dan dukungan para pemangku kepentingan dalam mendorong iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya wisata dan pariwisata dengan pernak perniknya. Secara umum, pengertian ekonomi kreatif adalah suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama.

BAB IV

Memiliki Kemitraan Desa Wisata

A. Mekanisme dalam Kemitraan

Menurut Hidayah (2019), daya saing sebuah destinasi pariwisata diperoleh dari tercapainya tujuan fungsi-fungsi destinasi yang salah satunya adalah fungsi koordinasi. Hidayah (2019) juga menegaskan bahwa fungsi koordinasi organisasi pengelola destinasi memiliki keluaran (output) kolaborasi yang kompak (cohesive colaboration) dari para stakeholder destinasi wisata yang memiliki sifat multi stakeholder.

Asumsi dasar dari mekanisme kolaborasi adalah hubungan kemitraan pada setiap stakeholder yang dibangun agar saling memiliki manfaat dan saling melengkapi (Suherlan, 2017). Sementara itu, kerjasama kemitraan (colaboration partnership) menurut Arifin (2011:42) dapat dipahami secara sederhana sebagai sebuah ikatan kerja sama antara personal atau organisasi sehingga menghasilkan manfaat bersama.

Pendekatan pihak-pihak yang terlibat dalam stakeholder pariwisata yang diacu oleh Kementerian Pariwisata Indonesia mengusung konsep model penta helix. Secara Bahasa, penta berarti 5 (lima) dan helix berarti sinergi. Jadi secara bahasa dapat disimpulkan bahwa penta helix adalah sinergi dari lima pihak atau aktor yang saling berkolaborasi. Model penta helix ini merupakan pengembangan dari model triple helix dan quadruple helix yang sebelumnya telah berkembang dalam konsep pembangunan kreatifitas sumber daya manusia suatu daerah.

Penta helix berisi lima pihak yang saling bersinerg yaitu akademisi, industri (swasta) pemerintah, masyarakat lokal dan media. Untuk kerjasama dengan pemerintah dilakukan dengan semua tingkatan pemerintah seperti Desa, kelurahan, Kecamatan, Kabupaten /Kota sampai ke pusat. bicara kerjasama dengan pemerintah yang terlibat bukan hanya dari Dinas saja, tetapi dengan semua unsur kedinasan yang ada. Seperti mengenai penataan Sapta Pesona ketiga tentang hijau (green) desa wisata bisa bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup, untuk tanaman pangan dengan dinas pertanian dan. Terus untuk kesehatan bekerjasama

dengan Dinas Kesehatan.

Selanjutnya untuk rambu-rambu desa wisata bisa bekerjasama dengan dinas perhubungan, untuk aksesibilitas juga bisa bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta Cipta Karya untuk jalan.

Kemitraan, menurut Webster's Dictionary, merupakan sebuah hubungan yang dibangun oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang memiliki karakteristik khusus yang dibutuhkan oleh pihak lainnya dan biasanya melibatkan kerja sama yang erat antara dan tanggung jawab bersama. Sementara itu, kerjasama kemitraan (*colaboration partnership*) menurut Arifin (2011: 42) dapat dipahami secara sederhana sebagai sebuah ikatan kerja sama antara personal atau organisasi sehingga menghasilkan manfaat bersama. Komponen penting dari sebuah kerjasama kemitraan (*colaboration partnership*) dengan masyarakat agar berhasil dengan baik adalah tim yang bertanggung jawab, komitmen setiap stakeholder dan tujuan bersama yang hendak dicapai (Wise, et al, 2005).

Kemitraan strategis mencakup berbagai jenis kemitraan mulai dari keterlibatan rendah, hubungan pendanaan hingga keterlibatan tinggi, usaha patungan ekuitas.

Dalam kemitraan ini, para mitra melihat masalah-masalah sulit yang memengaruhi kedua misi mereka, dan tidak dalam posisi untuk menyelesaikan berbagai hal sendiri. Dengan demikian mereka dituntut untuk berkolaborasi agar berhasil. Kemitraan strategis, menurut teori kemitraan, yang paling potensial untuk nilai tambah, karena kekuatan gabungan memungkinkan para aktor untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai oleh kedua pasangan itu secara sendiri-sendiri (Neergaard dkk., 2009). Untuk itulah perlunya melakukan kemitraan dengan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Untuk pemasaran, harus bekerjasama dengan biro perjalanan, karena Desa wisata pun harus menjaga kode etik dengan Biro Perjalanan. bahwa siapapun yang mendapatkan tamu, masuknya tetap harus satu pintu yaitu melewati Pokja Pemasaran di pokdarwis.

Strategi *marketing* yang dilakukan oleh Desa wisata hendaknya lebih banyak menggunakan media sosial baik Instagram maupun facebook. Mereka banyak melakukan follow sebanyak-banyaknya kepada sekolah dan travel. Dari situ mereka kirim pesan langsung atau DM (*direct message*) paket-paket yang ada di desa wisata. Semua anggota pokja Ladesta semuanya merupakan *marketing*.

Arah strategi & kebijakan pengembangan Desa Wisata adalah untuk menjadikan Desa Wisata yang dikelola secara baik dan professional yaitu menggunakan pendekatan bisnis yang melibatkan seluruh *stakeholder* dalam kerangka Penta-Helix, dengan tujuan akhir untuk kesejahteraan bersama. Peran serta *stakeholder* yang terlibat di dalam pengembangan Desa Wisata dalam konsep

kemitraan strategis telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan kekompakan yang dilandasi oleh asas saling percaya, keterbukaan, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan.

Biasanya aspek keuangan merupakan alasan klasik yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh berbagai Desa Wisata. Selain itu, stigma yang negatif mengenai pariwisata bagi masyarakat merupakan tantangan terbesar untuk mengembangkan desa wisata. Namun dengan berpegang pada lima konsep pengelolaan desa wisata, yakni kepemimpinan, sistem pembagian profit, inovasi produk, kemitraan, dan pemasaran melalui pendekatan personal, kekeluargaan, memberikan bukti kongkrit kepada masyarakat serta melalui strategi kemitraan merupakan strategi ampuh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dibentuknya suatu Desa Wisata.

Dalam mengembangkan usaha-usaha pariwisata masyarakat setempat berbasis kemitraan dan hasil akhirnya adalah meningkatnya kepuasan wisatawan dengan indikator meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan baik domestik maupun negara ke desa wisata.

Dalam usaha mengembangkan pariwisata inilah dituntut untuk menampilkan produk wisata yang bervariasi. Diantaranya adalah dengan menampilkan produk wisata yang belum terolah yang sesuai dengan permintaan dan keinginan wisatawan. Hal ini terlihat pada perubahan orientasi wisatawan yang makin tertarik pada kebudayaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Ketertarikan ini apabila diolah melalui suatu pengelolaan dengan baik akan bisa meningkatkan kunjungan dan lama tinggal para wisatawan

B. Bumdes, Koperasi dan Lembaga Desa

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah dua hal yang berbeda satu dengan lainnya. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang dikelola secara profesional yang berasal dari dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sedangkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebuah usaha sadar dari kelompok masyarakat secara kolektif tentang bagaimana melihat peluang, mengelola dan memelihara potensi objek wisata di desanya sehingga menjadi daya dukung terwujudnya Industri kreatif.

Industri kreatif saat ini dipandang semakin penting dalam mendukung perkembangan perekonomian Indonesia, berbagai pihak berpendapat bahwa “kreativitas manusia adalah sumber daya ekonomi utama” dan bahwa “industri abad kedua puluh satu akan tergantung pada produksi pengetahuan melalui kreativitas dan inovasi. Pada saat ini, Indonesia banyak memiliki UKM yang dikelola oleh Bumdes maupun Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang bergerak disektor usaha kreatif. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan

distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang dan jasa, misalnya produk makanan olahan yang diambil dari sumber alam (SDA) yang ada di wilayah tersebut, selanjutnya produk jasa pemasaran yang bersumber dari peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusianya (SDM) dan lain sebagainya.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/ BUMDes) menjadi salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun 2017 di samping 3 program lainnya, yakni One Village One Product (Satu Desa Satu Produk); Embung Desa; dan Sarana Olahraga. Melalui BUMDes, masyarakat desa didorong untuk mengelola ekonomi secara otonom.

Berdirinya BUMDes pada setiap desa harus berdasarkan dari hasil musyawarah desa. Unsur musyawarah desa terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan tani dan seluruh unsur masyarakat desa lainnya. Pendirian BUMDes seyogyanya sesuai dengan kebutuhan, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Hadirnya BUMDes dalam hal ini menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut, yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa. Di sisi lain, dana desa sebagai salah satu program utama pemerintah yang menggelontorkan dana langsung ke desa, adalah stimulus agar kemudian desa mampu berkembang secara mandiri.

Sinergi BUMDes dan Koperasi dilakukan melalui kerjasama saling menguntungkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa. Sebagai contoh, BUMDes yang telah mandiri dapat mendirikan Koperasi simpan pinjam, koperasi jasa angkutan, koperasi pertanian, dan unit usaha lainnya. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. 33 Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa diartikan sebagai berikut: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Sedangkan BUMDes didefinisikan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6

Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes dibangun dengan tujuan untuk menggerakkan dan mengakselerasi perekonomian desa. Harapannya segala sumber daya yang dimiliki desa bisa dikelola oleh warga desa sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga desa bisa mandiri.

Cara kerja BUMDES sendiri adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa (Zulkarnaen, 2016) (Trisnawati & Indrajaya, 2017).

Wacana implementasi BUMDes semakin tegas dengan lahirnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Terbitnya PP Nomor 47 Tahun 2015 menghendaki adanya desa yang mandiri dan otonom dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya dimana BUMDes diharapkan dapat berperan dalam peningkatan perekonomian pedesaan BUMDes memiliki potensi yang besar (Anggraeni, 2016) (Prasetyo, 2016).

Kontribusi dana desa tahun 2015 yang tertera dalam Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pasal 9 bahwa salah satu prioritas dalam pemanfaatan desa adalah pendirian dan pengembangan BUMDes.

Desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan desa namun juga kepentingan masyarakat desa.

BUMDes bisa menjadi jalan mewujudkan power tersebut menjadi lebih aktual. Karena BUMDes diproyeksikan sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan di Indonesia. Hadirnya BUMDes pun demikian, sebagai aktivitas usaha dari desa, oleh desa, dan untuk desa.

Desa adalah *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri berarti desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat (Widjaja, 2003).

Sedangkan pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional (Rafsanzani, Supriyono, & Suwondo, 2010). Pemerintahan desa bisa dimaknai sebagai subsistem dari

sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran berkenaan dengan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003).

BUMDes bisa mengambil peran dalam hal ini dengan melakukan proses pemberdayaan kepada warga desa. Pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha desa, ketersediaan berbagai fasilitas, memperkuat lembaga yang mendukung rantai produksi, distribusi dan pemasaran, serta mengoptimalkan segala sumber daya untuk meningkatkan ekonomi desa.

Salah satu misi pemerintah adalah membangun desa yang mampu dicapai melalui proses pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha desa, ketersediaan berbagai fasilitas, memperkuat lembaga yang mendukung rantai produksi, distribusi dan pemasaran, serta mengoptimalkan segala sumber daya untuk meningkatkan ekonomi desa.

Partisipasi tidak sebatas aktivitas fisik, namun juga melibatkan mental dan emosional orang-orang pada situasi kelompok untuk memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan kelompok (Davis & Newstrom, 2007).

Hal inilah yang diharapkan dalam proses pelaksanaan BUMDes ini. Memang, selayaknya dalam setiap proses pembangunan, warga negara semestinya terlibat dalam keseluruhan proses, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi secara berkelanjutan. Proses ini dikenal juga dengan pembangunan partisipatif.

Partisipasi tidak sebatas aktivitas fisik, namun juga melibatkan mental dan emosional orang-orang pada situasi kelompok untuk memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan kelompok (Davis & Newstrom, 2007).

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat mulai dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, serta pencarian alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah, melaksanakan solusi yang telah dipilih serta melakukan evaluasi langsung terhadap perubahan yang terjadi. (Isbandi, 2007).

Urgensi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sebagaimana halnya BUMDes, bisa ditinjau secara kritis dengan meminjam analisis Conyers (1994). Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi terkait dengan kondisi, kebutuhan, dan masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan, perencanaan, sampai pelaksanaan sehingga melahirkan rasa memiliki terhadap proses tersebut. Ketiga, bahwa merupakan suatu hak

demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Selanjutnya, lebih komprehensif Moeljarto (1987) menjabarkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena a) partisipasi melahirkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat terlibat dalam mencapai keputusan penting dalam kehidupan masyarakat, b) partisipasi mengkondisikan suatu lingkungan umpan balik informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya tidak akan terungkap, c) pembangunan dilaksanakan lebih baik dimulai dari di mana masyarakat berada dan dari apa yang mereka miliki, d) partisipasi memperluas kawasan penerimaan program pembangunan, e) memperluas jangkauan layanan pemerintah kepada masyarakat, f) partisipasi menopang pembangunan, g) partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia, h) partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan manusia untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah, i) partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu. Tujuan yang ingin dicapai melalui partisipasi adalah pemberdayaan, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat yang terlibat aktif dan berinisiatif dalam proses pembangunan, dari perencanaan bersama, pelaksanaan sampai evaluasi.

Sedangkan manfaat dari partisipasi, merujuk pada analisis Westra (dalam Isbandi, 2007) adalah sebagai berikut: 1. Lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar. 2. Dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat 3. Dapat mengembalikan nilai-nilai martabat manusia, dorongan serta membangun kepentingan bersama. 4. Lebih mendorong orang untuk lebih bertanggungjawab. 5. Memperbaiki semangat bekerjasama serta menimbulkan kesatuan kerja 6. Lebih memungkinkan mengikuti perubahan-perubahan.

Hal ini senada yang diterangkan Rahardjo (dalam Ramadana et al., 2013) bahwa BUMDes dibangun melalui prakarsa warga yang mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emasipatif, dengan dua prinsip yang menjadi dasar yaitu *member base* dan *self help*. Oleh karenanya BUMDes dimiliki oleh warga desa dan juga pemerintah desa.

Penguatan kapasitas BUMDes perlu menerapkan di level individu pada langkah awal pertama adalah rekrutmen posisi jabatan di BUMDes. Setelah itu mengikuti pendidikan dan pelatihan, motivasi, kepemimpinan, manajemen, *standard operational procedure*, kemitraan dan *partnership*, tata tertib, penyusunan skala prioritas pelatihan usaha, permodalan dan pendampingan.

Penguatan kapasitas yaitu berupa individu, organisasi, dan sistem maupun peningkatan perekonomian berupa pelatihan usaha, permodalan, dan pendampingan

1. Penguatan Kapasitas Individu

- a. Rekrutmen Rekrutmen adalah Proses berlangsung mulai dari mencari pelamar hingga pengajuan lamaran oleh pelamar, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Adapun rekrutmen dapat memenuhi pengembangan-pengembangan yang berlandaskan pada urutan dengan pengembangan, pengalokasian pegawai, dan penetapan imbalan jasa adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan Rekrutmen atau pembukaan lowongan pekerjaan
 - 2) Pengalokasian Pegawai
 - 3) Penetapan Imbalan Jasa
- b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Siagian (dalam Robiah, 2015: 17) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ialah sumber untuk meningkatkan kapasitas. Sedangkan Pendidikan ialah terbentuknya dalam program yang memenuhi metode belajar mengajar untuk membuah hasil pengetahuan dari seseorang kepada orang lain yang akan seimbang dengan yang ditetapkan.
- c. Program pelatihan adalah menurut Sutrisno (dalam Setyawan, 2019: 59) suatu program dapat diukur tingkat efektivitasnya melalui dua indikator yaitu indikator tercapainya tujuan dan indikator perubahan nyata. Indikator tercapainya tujuan sendiri memiliki makna bahwa suatu program tentu memiliki tujuan awal yang harus di penuhi sesuai target yang telah ditentukan. Indikator tercapainya tujuan juga memiliki makna yang menyatakan bahwa suatu program yang telah direncanakan dan memiliki target, harus dipenuhi kemudian hasil akhir yang diperoleh telah memenuhi target tersebut, dan program dapat dikatakan efektif.
- d. Metode pelatihan melaksanakan Program Keuangan, pelatihan dan pendampingan bagi pengurus BUMDes. Pelatihan tersebut mencakup penyusunan visi dan misi organisasi, pembuatan struktur organisasai dan penyusunan diskripsi kerja bagi masing-masing pengurus. Penyusunan AD/ART BUM Des dan penyusunan rencana usaha bagi BUMDes maupun melakukan evaluasi.
- e. Motivasi adalah dorongan usaha meningkatkan efektifitas pegawai pada umumnya bentuk motivasi yang berupa pengukuran motivasi dapat dilaksanakan dengan kesempatan mendapatkan penghargaan, dan promosi Sudirman (dalam Robiah, 2015: 19) antara lain:
 - 1) Penghargaan Penghargaan merupakan pelaksanaan karyawan atau pegawai BUMDes yang melaksanakan tugas dengan memperoleh penghargaan dalam konteks kompetisi
 - 2) Mendapatkan Promosi BUMDes, Cara mendapatkan promosi

dilaksanakan membuat web. Seperti, instagram, Youtube, dan Facebook. Pegawai mengetahui cara dan tehnik mempromosikan di media sosial.

2. Penguatan Kapasitas Organisasi

- a. Kepemimpinan adalah Kegiatan seseorang telah memimpin, membimbing, dapat mengendalikan pikiran, perasaan, dan tingkahlaku orang lain. Dengan menjalankan tugas pokok maka dapat di jalankan tugas dan fungsi sebagai hal yang berjalan efektif dan efisien. Maka tugas dan fungsi pokok dapat di uraikan dengan kejujuran, perhatian, ide yang baru, rasa menghormati orang lain Yuwono (dalam Robiah, 2015: 20).
- b. Manajemen adalah membuat keputusan struktur organisasi, rencana kerja, program kerja, dan evaluasi rencana kerja.
 - 1) Kemitraa Struktur organisasi merupakan bagan yang berhubungan dari komponen struktur kepemimpinan yang merencanakan tanggungjawab dari pelaksanaan disetiap anggota organisasi.
 - 2) Program Kerja adalah susunan daftar agenda kegiatan organisasi yang disepakati oleh pengurus organisasi. program kerja yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek dilaksanakan 2 tahun. Jangka menengah dilaksanakan 3 tahun, jangka panjang dilaksanakan 5 tahun.
 - 3) Evaluasi rencana kerja adalah informasi yang bersifat efektifitas, nilai, tujuan, manfaat, dan kriteria. Tujuan evaluasi adalah program yang diberikan rekomendasi keputusan hasil rencana kerja BUMDes. sebagai intruksi evaluasi dari pengawas dalam melaksanakan tugas yang belum terealisasikan.
 - 4) Standar Operational Procedure Dalam Robiah, (2015: 21) Standar Operational Procedure (SOP) ialah dokumen dalam proses prosedur untuk menghasilkan pekerjaan diperusahaan. Namun, sebagai karyawan perusahaan berproses untuk memahami tugas dan fungsi untuk pertanggungjawaban pelayanan didalam organisasi SOP yang dimiliki di BUMDes diantaranya adalah perencanaan guna menjalankan, membimbing tugas-tugas yang didalam pelayanan organisasi.
- c. atau Partnership BUMDes (dalam Robiah, 2015: 22). Kemitraan adalah adaptasi ikatan kerja sama guna membutuhkan kapasitas dan Proses kerjasama mitra BUMDes.
- d. Penguatan Kapasitas Sistem Tata Terib Dalam Robiah, (2015: 23) Tata tertib adalah realisasi AD/ART kebijakan kinerja yang direncanakan dan dipatuhi oleh pegawai Badan Usaha Milik Desa
- e. Penyusunan Skala Prioritas Penyusunan skala prioritas adalah penyusunan rencana kerja karyawan yang akan dilaksanakan dalam waktu yang

- singkat.
- f. Peningkatan Perekonomian adalah kondisi perekonomian yang lemah menjadi maju. Maupun mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan berupa mengelola pembangunan perekonomian desa.
 - g. Pelatihan Usaha Pelatihan adalah proses pengembangan melalui pelatihan berbasis IT, Periklanan, fasilitas, dan teknologi.
 - h. Permodalan adalah kegiatan menjalankan dana belanja operasional di perusahaan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan sesuai skala yang dibutuhkan.
 - i. Pendampingan adalah membantu pengembangan sumber daya manusia yang mendampingin mengetahui pelaksanaan berdasarkan keterikatan karakteristik yang akan dihadapi dalam kegiatan pendampingan.

Resource Based View Untuk mewujudkan desa mandiri, maka diperlukan sumber daya yang berasal dari desa tersebut. Unit-unit usaha yang bergerak di desa haruslah memiliki ciri khas dan keunggulan kompetitif supaya dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Secara lebih spesifik berdasarkan teori resource based view, maka desa harus memiliki sumber daya tersebut haruslah bernilai, langka, tidak disubstitusi, dan tidak diimitasi (Barney, 1991). Keunggulan kompetitif tersebut ditentukan oleh modal sosial, modal manusia, dan modal finansial (DeMassis et al., 2011).

C. Permasalahan yang dihadapi BUMDes

1. Komunikasi antara sesama anggota dan atau dengan pengurus yang biasa sering terjadi karena tidak terjadi kemufakatan, bisa karena factor suka dan tidak suka, atau karena setuju atau tidak setuju, dengan beragam alasan seperti ingin memaksakan kehendak atau ada unsur kepentingan pribadi, sehingga akan terjadi perpecahan karena selisih pendapat tadi.
2. Transparansi dan Akuntabilitas BUMDes telah memiliki mekanisme pelaporan rutin setiap tahun. Laporan tersebut dibuat tertulis dan diberikan kepada pemangku kepentingan. Permasalahan yang muncul adalah warga tidak mengerti tentang isi laporan, tidak membacanya, atau tidak mengetahui apabila ada laporan tahunan.
3. Kapasitas Manajerial yakni kemampuan dalam memimpin dan memberdayakan anggota dalam pengorganisasian tugas-tugasnya. Apakah menggunakan metode bos besar dengan perintah dan tunjuk atau dengan

melakukan pendekatan persuasive terhadap anggotanya atau pengurus, sehingga diperlukan pemimpin yang mampu menangani situasi dan dinamika kelompok yang beragam

4. Legal Standing Permasalahan terkait legal standing adalah belum adanya peraturan desa yang mengukuhkan keberadaan BUMDes. BUMDes juga belum memiliki akta notaris.

Umumnya, kekhasan dari sebuah desa wisata adalah pertanian, peternakan, kesenian, makanan, pemandangan, kerajinan, dan kepercayaan masyarakat. Inti dari desa wisata adalah penguatan peran dan eksistensi masyarakat melalui pariwisata. Faktor pentingnya adalah kekhasan dari desa (Rahmatillah, 2019). Desa wisata telah menjadi trend pariwisata masa kini, masyarakat modern lebih mencari desa wisata sebagai alternative wisatanya (Sugiarti, 2016). Upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya dapat dilakukan dengan pengembangan desa wisata (Wahyuni, 2019). Masyarakat yang memiliki potensi sebagai atraksi wisata diajak dan didampingi untuk menyusun rencana, menetapkan tujuan, melaksanakan kegiatan, hingga mengevaluasi untuk mendapatkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Partisipasi masyarakat adalah kunci dalam keberhasilan pengembangan desa wisata.

Salah satu yang harus dikembangkan adalah sikap melayani, konsumsi terjadi karena adanya keinginan untuk memperoleh layanan wisata ketika berkunjung kesuatu objek wisata (Cohena et al., 2014). Kondisi di desa wisata juga perlu memperhatikan faktor pengalaman yang bisa diperoleh oleh wisatawan. Pengalaman wisata adalah inti dari industri pariwisata dan perhotelan (Zhang, Wu, & Buhalis, 2017).

Kepuasan wisatawan adalah kunci keberhasilan pengelola objek wisata, hal ini dapat dilihat dari pola yang ditunjukkan oleh konsumen yang puas, mereka biasanya memutuskan untuk berkunjung kembali (Hyunjin, 2013; Kotler et al., 2017).

Daftar Pustaka

- Abidin, H Z. (2017). Pemetaan Desa untuk Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan . Badan Informasi Geospasial, Bogor. Diakses dari <http://www.keuangandes.com/wpcontent/uploads/2017/06/Pemetaan-Desa-untuk-Percepatan-Pembangunan-Desa-danKawasanPerdesaan.pdf> . diakses 25 Juli 2018.
- Abraham Ferry Rosando, (2020),” Legalisasi Pembentukan Desa Wisata Budaya PLUNTURAN dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo”, Seminar Nasional Konsorsium UNTAG, Indonesia ke-2 Tahun 2020.
- Agunggunanto, 2016. “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Volume 3 Nomor 1, hal 67-81.
- Agus Muriawan Putra, Konsep Desa Wisata, Jurnal Manajemen Pariwisata, Juni 2006, Volume 5, Nomor 1
- Agustin Wulan Suci-Dharmayanti^{1*} (2019) Pemetaan Potensi Desa Sebagai Model Untuk Membangun Desa Sehat dan Mandiri (Studi Kasus : Desa Bandilan, Kecamatan PRAJEKAN, Kabupaten Bondowoso), Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sains (SNasTekS) 18 September 2019.
- Ami Suswandi Putra (2013), Pola Kemitraan Pariwisata dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda”, Jurnal Nasional PARIWISATA, Volume 5, Nomor 3, Desember 2013 (189 - 200)
- Anggraeni, Maria RRS. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunung Kidul. Jurnal Modus 28(2) 155-167. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Ani Wijayanti dkk (2020), “Pelatihan Sadar Wisata Dan Sapta Pesona Bagi Masyarakat Desa Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo, ResonaJurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, Volume 4 No. 1.
- Ariando, Valdo. (2015). Destination Branding Kepulauan Seribu: Studi Kasus Destination Branding Kepulauan Seribu Dalam Upaya Mengembangkan Destinasi Wisata Bahari Internasional. Yogyakarta:UGM-Ilmu Komunikasi (S1)

- Asni Anwar (2018),”Penerapan Sadar Wisata dan Sapta Pesona Pada Masyarakat Desa MATTIROBAJI Kabupaten Pangkep ,Jurnal Ecosystem Volume 18, Nomor 2, Mei - Agustus 2018
- Ativa, S., 2012. Makalah Pendidikan Informal. (online), (<https://sitiativa.wordpress.com/2010/9/09/makalah-pendidikan-informal/>), diakses pada 16 Juli 2016
- Damayanti, E. , M. Saleh S. & Heru R. 2014. Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampung Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampung Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), (online), Vol.2, No.3, Hal. 464-470. (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=&title=Strategi> Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampung Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang), diakses 15 Juli 2016 Joesoef, S.2008.
- Bungin, Burhan. (2015). Komunikasi Pariwisata (Pemasaran Dan Brand Destinasi). Cetakan ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Clara Shinta Paskasari dkk (2020), “Kapasitas Kelembagaan Pengelola Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman”, Jurnal Pariwisata Terapan Vol. 4, No. 1, 2020
- Conyers, D. (1994). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Davis, K., & Newstrom, J. (2007). Perilaku dalam Organisasi. Jakarta: Erlangga
- Dimas Kurnia Purmada, (2016), “Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 32 No. 2 Maret 2016
- Dodi Faedlulloh, 2018 BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris Journal of Governance Volume 3, Issue 1, June 2018 (1-17) (P-ISSN 2528-276X) (E-ISSN 2598-6465) <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035>
- Donny Anhar Fahmi dkk (2018), “Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Pengembangan Desa Wisata di Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati”, Journal of Dedicators Community UNISNU JEPARA, Vol. 2 No. 1 Januari 2018
- Firmansyah, Rahim. (2012) Pedoman Kelompok Sadar Wisata. Jakarta: Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Freitas, H., Oliveira, M., Jenkins, M., & Popjoy, O. (1998). The Focus Group, a qualitative research method. Isrc, Merrick School of Business, University of Baltimore (MD, Eua), WP Isrc, (010298), 22. Goncalo, J. A., Polman, E.,

- & Maslach, C. (2010). Can confidence come too soon? Collective efficacy, conflict and group performance over time. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 113(1), 13–24.
- Gita Ratri Prafitri* , Maya Damayanti (2016), “ Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata KETENGER, Banyumas)”; *Jurnal Pengembangan Kota* (2016) Volume 4 No. 1 (76–86)
- Greenlees, I. A., Nunn, R. L., Graydon, J. K., & Maynard, I. W. (1999). The relationship between collective efficacy and precompetitive affect in rugby players: Testing Bandura’s model of collective efficacy. *Perceptual and Motor Skills*, 89(2), 431–440.
- Grindle, Merille S, 1997, *Getting Good Government Capacity Building in The Public Sectors of Developing Countries*, Cambridge: Harvard University Press.
- Horton, D., Alexaki, A., Bennett-Lartey, S., Brice, K N., Campilan, D., Carden., F., Silva, J S., Duong, L T., Khadar, I., Boza, A M., Muniruzzaman, I K., Perez, Jocelyn., P., Chang, M S., Vernoooy, R., dan Watts, J, 2003, *Evaluating Capacity Development: Experience From Research and Development Organizations Around The World*, Wagenigen: Isnar.
- Harjanti Widiastuti, Etik Kresnawati, Evy Rahman Utami, (2019) Pemetaan Potensi Desa dalam Rangka Mewujudkan Bumdes Di Kecamatan Moyudan, *Jurnal BERDIKARI Vol.7 No.1 Februari 2019*.
- Hasan, Ali. (2015). *Tourism Marketing*. Yogyakarta: Penerbit CAPS. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (c.2). Jakarta, Menteri Dalam Negeri.
- I Wayan Pantiyasa (2020), “Evaluasi Pengelolaan Desa Wisata Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan”, *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, Vol. 10 No. 2, Juni 2020
- Ilham Junaid dan Muh. Arifin M. Salim, (2019), “Peran Organisasi Tata Kelola Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta, PUSAKA:Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event, Volume 1, No.1 (2019) 1-7
- Inten, Kinasih. (2018). *Upaya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Isbandi, R. A. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP IU Press.
- Ketut Teddy Wisastrawan, (2020), “Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar)”, *VJRA*, Vol.9, No.1 April 2020

- Kiky Srirejeki, dkk (2020), Pemetaan Potensi Desa untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa dengan Pendekatan Asset Based Community-Driven Development, Jurnal Warta LPM Vol. 23, No. 1, Maret 2020, hlm. 24-34
- Komar, O. (2017). Penguatan Kapasitas Kelembagaan PLS Dalam Memasuki Era Kompetitif Mea. Empowerment: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, 6(2), 1-10.
- Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah. Jakarta : PT Bumi Aksara. Munif, A. 2012. Aspek Sosialisasi dan Pendidikan.(online),(<https://environmentalsanitation.wordpress.com/2012/11/04/pengertian-dan-teori-sosialisasi/>), diakses pada 16 Juli 2016 Rahim, F. 2012.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. (1993). Building communities from the inside out. Center for Urban Affairs and Policy Research, Northwestern University
- Maria Magdalena Widiartari dan Fikri Hasan, (2019),” Pelatihan Keterampilan Komunikasi Pokdarwis Desa Wisata Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun”, DAYA - MAS : Media Komunikasi Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Volume 4 Nomor 2 September 2019
- Menggagas Interkoneksi Antar Jalur Pendidikan: Sinergi Pendidikan Sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah dalam Pembangunan Pendidikan Nasional. Pidato Pengukuhan Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah pada Fakultas Ilmu Pendidikan disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Malang, 10 Oktober
- Moeljarto, T. (1987). Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah Dan Strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muchammad Sugianto, (2016),” Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kemitraan di Desa Koloray Kabupaten Pulau Morotai”, Jurnal Sosiologi USK, Volume 10, Nomor 2, Desember 2016
- Munawar Sadali, (2021),” Penerapan Sadar Wisata Untuk Meningkatkan Sapa Pesona DI Pantai Gedamban Kotabaru”, Jurnal Sosial Pariwisata 2021, Vol. 1, No. 2, hal 60-66,
- Mwiru, M. (2015). The importance of community participation in development projects at local level: A case of Dodoma municipal council. Mzumbe University
- Pambudi, Agung. (2018). revitalisasi sumber daya alam sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis wisata studi di taman tebing breksi desa sambirejo kecamatan prambanan sleman. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Pedoman Pokdarwis Kemenpar. (online), (http://www.kemenpar.go.id/userfiles/1_%20Pedoman%20Pokdarwis.pdf), diakses pada 31 Juli 2016 Supriyono. 2012.
- Pranyoto Sat, Victorianus. (2019). Desa Sambirejo Prambanan Luncurkan Inovasi

- “Bumisadu”. Antara News. Akses Pada 28 Oktober 2019. jogja.antaranews.com/berita/363139/desa-sambirejo-prambanan-luncurkan-inovasi-bumisadu
- Prasetyo, Ratna A. (2016). Peranan BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika* 10 (1) 86-100.
- Puri Oksi Arida Hidayat, (2018), “Komunikasi Partisipatif Kelompok Sadar Wisata dalam mengembangkan pariwisata kabupaten Magelang (Studi Kasus desa wisata Wanurejo dan desa Wisata Karanganyar)” NASKAH PUBLIKASI, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Rafsanjani, H., Supriyono, B., & Suwondo. (2010). Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. *Jurnal Adminintrasi Publik*, 1(4).
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rifqi Agianto, (2021),” Analisis Teknik Komunikasi dan Negoisasi Bisnin Pada Drama START-UP”, *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 01 No. 02, Mei 2021 : 105 – 118
- Robiah, S. (2015). Penguatan Kapasitas Organisasi Publik (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Srirejeki, K. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 33–37.
- Srirejeki, K. (2018). Empowering the role of village owned enterprises (BUMDes) for rural development: case of Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajemen Dan Ekonomi*, 20(1), 5–10
- Sujarweni, V. W., & Jaya, I. M. L. M. (2019). Pengelolaan Keuangan Bumdes Sambimulyo di Kawasan Geoheritage “Tebing Breksi” Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 1(2).
- Surya Arif Wijaya, Zulkarnain, Sopingi (2016),” Proses Belajar Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Dalam Pengembangan Kampoeng Ekowisata”, *Jurnal Pendidikan Nonformal Volume XI*, No. 2, September 2016
- Suryawan, A. (2016). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sendang Arum Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Tlahap Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung). *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah-S1*, 5(6), 143-152.
- Theofilus Retmana Putra (2013),” Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Atraksi

- Wisata di Desa Wisata Tembi, Kecamatan Sewon-Kabupaten Bantul”, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Volume 9 (3): 225-235 September 2013
- Trisnawati, Ayu P. & Indrajaya, Gusti B. (2014). Peran BUMDes Bagi Petani Miskin di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6 (6) 1097-1126. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/art_icle/vi
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Utami, A. N., & Rahman, A. Z. (2017). Pelaksanaan Progam Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona melalui Pelestarian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 591- 606.
- Venty Nur Oktaviasari, dkk Makalah “Persepsi Komunikasi dan Identitas Diri” Dosen Pengampu : Dr. Drs. Muhammad Shobaruddin, M.A., Universitas Brawijaya.
- Widjaja, H. A. (2003). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf Adam Hilman, (2017), “Kelembagan Kebijakan Pariwisata di Level Desa”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2– Nomor 2, Oktober 2017, (Hlm 150-163)*
- Zulkarnaen, Reza. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Dharmakarya* 5(1)
- Muhammad Fauzan Noor, SE.Par., M. Par., MMHTRL, Dosen Jurusan Pariwisata, Program Studi DIV Usaha Perjalanan Wisata pada Politeknik Negeri Samarinda (POLNES)
- Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Pada Universitas Mulawarman

Profil Penulis



Muhammad Fauzan Noor, SE.Par., M. Par., MMHTRL,
Dosen Jurusan Pariwisata, Program Studi DIV Usaha
Perjalanan Wisata pada Politeknik Negeri Samarinda
(POLNES)



Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si, Dosen Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik,
Pada Universitas Mulawarman

